



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE TAHUN 1971-1998**

**SKRIPSI**

Disajikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh

*Erlina Yuli Astuti*  
NIM. D1A195031 / SP

Asal : Hadiah  
Pembelian  
Terima Tgl: 29 JUN 2000  
No. Induk :

S  
Klasifikasi  
332.41  
AST  
2

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2000**

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1971-1998

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**N a m a** : ERLINA YULI ASTUTI

**N. I. M.** : D1A195031

**J u r u s a n** : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

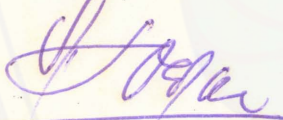
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

6 Mei 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. BAMBANG YUDONO

NIP. 130 355 409

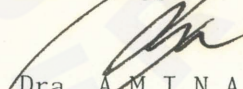
Sekretaris,



Drs. URIP MUHARSO

NIP. 131 120 333

Anggota,



Dra. A M I N A H

NIP. 130 676 291



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan  
  
Drs. H. SUKUSNI, MSc  
NIP. 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erlina Yuli Astuti  
Nomor Induk Mahasiswa : D1A195031  
Tingkat : Sarjana  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi mata kuliah  
dasar penyusunan Skripsi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan  
Dosen Pembimbing : 1. Dra Aminah  
2. Drs. Zainuri, MSi

Disahkan di : Jember

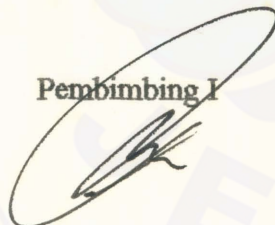
Pada tanggal : April 2000

---

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

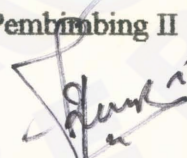
Pembimbing I



Dra. Aminah

NIP.130676291

Pembimbing II



Drs. Zainuri, MSi

NIP.131832336

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erlina Yuli Astuti  
Nomor Induk Mahasiswa : D1A195031  
Tingkat : Sarjana  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi mata kuliah  
dasar penyusunan Skripsi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan  
Dosen Pembimbing : 1. Dra Aminah  
2. Drs. Zainuri, MSi

Disahkan di : Jember

Pada tanggal : April 2000

---

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

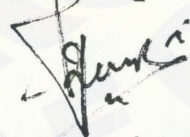
Pembimbing I



Dra. Aminah

NIP.130676291

Pembimbing II



Drs. Zainuri, MSi

NIP.131832336

**MOTTO :**

Kita belum pernah berbuat sesuatu yang besar  
Karena kita cenderung memilih jalan termudah  
Padahal kesabaran yang hakiki  
Terletak pada banyaknya berinteraksi  
Dengan berbagai lapisan masyarakat  
Dengan penuh toleransi dan kasih sayang.

*(Asy Syahid Sayyid Qutub)*

Barang siapa berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah  
dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang  
kesulitan atau hindarkanlah kesulitannya.

*(HR. Muslim)*

**KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :**

Ayahanda Sukiran dan Ibunda Sutirah, muara cinta dan kasihnya yang tiada ternilai yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do'anya demi kesuksesan putri-putrinya,

Almamater yang kubanggakan,

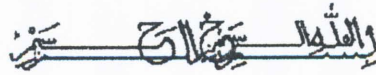
Kakanda Paput Eko Riyanti dan Adinda Rita Puspita Sari terimakasih atas kesabaran, do'a, dan kasihmu yang tiada tara,

Seluruh keluarga besar di kota Magetan terima kasih atas do'a dan dukungannya,

Anugerah-Nya yang kudamba,

Keluarga Besar N 19 : Windu , Yuli, Rien, Ratri, Edson sekeluarga, Iwan sekeluarga, keluarga Q 21 terimakasih atas kebersamaannya selama ini yang menjadikan hidup semakin indah dengan keeratan tali persaudaraan kita.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata I pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan khususnya yang terhormat :

1. Dra. Aminah dan Drs. Zainuri, MSi selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau;
2. Drs. H. Sukusni, MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi;
3. Karyawan Kantor Statistik Jember yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini;
4. Karyawan Kantor Bank Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini;
5. semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik bantuan pemikiran, tenaga maupun saran demi kelancaran penulisan skripsi ini;
6. teman-teman seperjuangan SP/GL '95 : Sri Rejeki, Kenya, Dyah Agustina, Vivin, Asih, Hariati, Enggar, Dody, Teguh, Ari, Nunung, Budi, dan semua yang tak disebutkan;

7. saudara-saudaraku di UKM-Kesenian Unej khususnya “SAFOLENS”: Berlean Bagus, Cak Wuwul, Rendro, Titik, Iwan, Heru, Dwi, Santi, Katon, Aji, Neni, Rasyid, Sulung, Fatkur, Hendri dan semua yang tidak disebutkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan baik yang menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, April 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.4 Hipotesis.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Definisi Operasional .....	15
<b>II. GAMBARAN UMUM INFLASI DI INDONESIA</b>	
2.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia .....	17
2.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia .....	19
2.3 Perkembangan Gross Domestic Product di Indonesia .....	22
2.4 Tingkat Harga Internasional.....	25
2.5 Perkembangan Anggaran Pemerintah di Indonesia .....	28

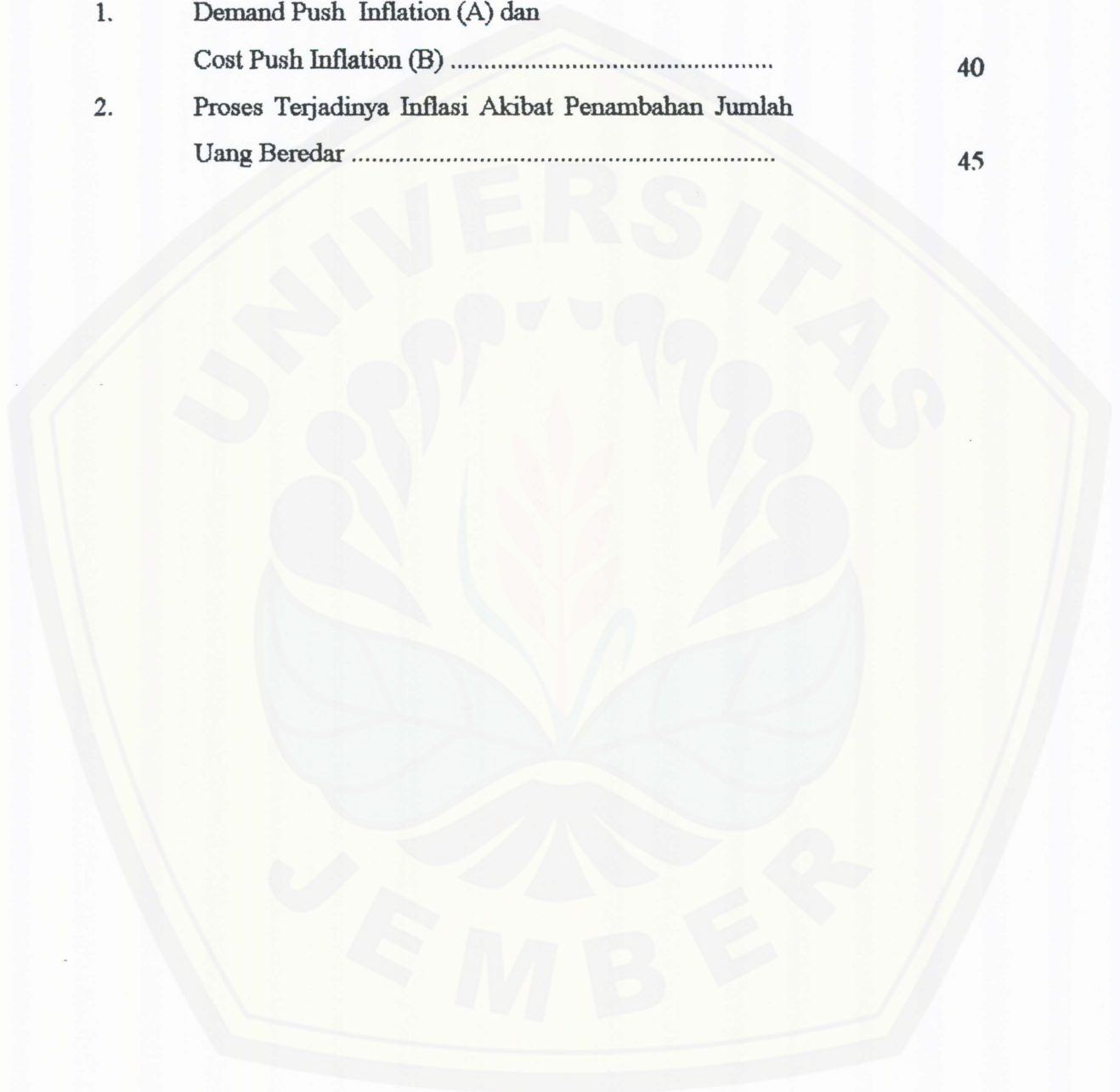
2.6 Perkembangan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia .....	30
III. LANDASAN TEORI	
3.1 Definisi dan Pengertian Inflasi .....	36
3.2 Indikator dan Metode Perhitungan Inflasi .....	37
3.3 Klasifikasi Inflasi .....	38
3.4 Teori Inflasi .....	40
3.5 Dampak Inflasi terhadap Perekonomian .....	51
3.6 Cara Mencegah Inflasi .....	52
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
4.2 Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Gross Domestic Product, Tingkat Harga Internasional dan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia.....	59
4.3 Pembahasan.....	69
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan .....	75
5.2 Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	81

**DARTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia Periode Tahun 1971 - 1998 (1990 = 100).....	18
2.	Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Beserta Komponen dan Laju Pertumbuhannya Periode Tahun 1971 - 1998 (Miliar Rupiah) .....	20
3.	Perkembangan GDP Riil Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1990 di Indonesia Periode Tahun 1971 - 1998 (Miliar Rupiah) .....	23
4.	Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Hasil industri Manufaktur (SITC 5-8) di Indonesia Periode Tahun 1971 - 1998 (Juta US \$) .....	
5.	Realisasi Anggaran Pemerintah Tahun Anggaran 1971/1972 - 1998/1999 (Miliar Rupiah).....	26
6.	Hasil Uji Akar-Akat Unit Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1971-1998.....	59
7.	Hasil Uji Derajat Integrasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1971-1998.....	60
8.	Nilai $r^2$ Hasil Regresi Antar Variabel Bebas .....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Demand Push Inflation (A) dan Cost Push Inflation (B) .....	40
2.	Proses Terjadinya Inflasi Akibat Penambahan Jumlah Uang Beredar .....	45



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan Inflasi Indonesia Periode Tahun 1971-1998 .....	55
2.	Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah).....	56
3.	Pertumbuhan Gross Domestic Product Riil di Indonesia Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah).....	57
4.	Pertumbuhan Indeks Harga Internasional Indonesia Periode Tahun 1971-1998.....	57
5.	Perkembangan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah di Indonesia Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah).....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Perhitungan Indeks Harga Internasional Periode Tahun 1971 -1998 .....	81
2.	Perhitungan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah Periode Tahun 1971-1998.....	83
3.	Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia .....	86
4.	Hasil Uji Akar-Akar Unit .....	87
5.	Hasil Uji Derajat Integrasi .....	90
6.	Hasil Uji Regresi Kointegrasi .....	93
7.	Hasil Estimasi PAM dan Koefisien Kovarian Matriks ..	95
8.	Hasil Estimasi ECM dan Koefisien Kovarian Matriks...	98
9.	Hasil Uji Autokorelasi, Heterokedastisitas dan Multikolinieritas dari Estimasi ECM.....	101

## I. PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian serta memajukan dan membangun masyarakat. Pembangunan ekonomi seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita, sehingga pembangunan ekonomi disamping meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktifitas (Irawan dan Suparmoko, 1990:5). *Output* yang dihasilkan ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya alam, manusia, teknologi, keadaan pasar dan sistem perekonomian. Perubahan-perubahan dalam struktur *output* dan alokasi *output* pada berbagai sektor perekonomian menunjukkan pembangunan ekonomi suatu negara yang pada awalnya beorientasi masalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang yaitu *output* total (Gross Domestic Product = GDP), (Boediono, 1998:6). Perekonomian yang menyimpang dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan terjadi dua kemungkinan yaitu inflasi akan naik terus menerus atau depresi akan semakin parah, sehingga perekonomian akan sulit untuk kembali pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Suatu negara yang berusaha mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan yang diperlukan maka perekonomian negara tersebut dapat mengalami inflasi (Dernburg, 1982:323), karena dalam mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dibutuhkan *input* yang lebih banyak serta dana yang lebih besar sehingga memicu terjadinya jumlah uang beredar yang tinggi di masyarakat.

Kondisi empiris pembangunan ekonomi nasional sebelum orde baru tahun 1960-1965, pertumbuhan GDP hanya mencapai 2% per tahun, inflasi tak terkendali mencapai 650% dan investasi mengalami penurunan yang drastis. Sejak Pelita I tahun 1969 pemerintah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi yang sasaran

utamanya adalah mengendalikan laju inflasi. Koordinasi yang baik dibidang moneter, fiskal dan devisa, maka inflasi dapat ditekan menjadi kurang dari 10% pada tahun 1969 dan bahkan menjadi 4,39% pada tahun 1971. Harga minyak yang naik cukup tajam menyebabkan pemerintah memacu kegiatan pembangunan ekonomi dengan melaksanakan program pemerataan melalui penyediaan kredit likuiditas. Pemberian kredit tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah uang beredar sebesar 48%, sehingga menyebabkan inflasi melonjak menjadi 40%. Usaha untuk mengatasi inflasi yang tinggi tersebut pada bulan April 1974 pemerintah menempuh kebijaksanaan pengendalian moneter secara langsung melalui penetapan pagu kredit. Sebagai hasil dari kebijaksanaan tersebut, secara bertahap inflasi dapat ditekan pada tingkat 9,3% pada tahun 1982 (Iswardono, 1993:165).

Memasuki tahun 1983, perekonomian Indonesia menghadapi kelesuan kegiatan ekonomi dalam negeri yang disebabkan karena penurunan harga minyak, berlangsungnya resesi ekonomi dunia sejak tahun 1980-an, meningkatnya tindakan proteksi negara-negara maju, dan melemahnya daya saing barang-barang ekspor, walaupun tingkat inflasi dalam negeri tidak terlalu tinggi. Kelemahan-kelemahan struktural seperti ekonomi biaya tinggi, inefisiensi, dan distorsi pasar memberatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan struktural tersebut, adalah deregulasi di bidang perbankan pada tanggal 1 Juni 1983 yang berupa penghapusan neto perbankan, pemberian kebebasan kepada bank-bank pemerintah untuk menetapkan kebijakan perkreditan, suku bunga, serta penyediaan likuiditasnya sendiri. Sektor industri ternyata meningkat setelah kebijakan tersebut diberlakukan, laju pertumbuhannya dari tahun 1982-1985 sebesar 4,4% menjadi 6,9% tahun 1987 dan tingkat inflasi terkendali dibawah 10% per tahun.

Kebijakan pemerintah agar APBN 1993/1994 dapat berekspansi dibandingkan APBN 1992/1993 mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa, yang secara spesifik disebabkan oleh beberapa faktor utama diantaranya adalah devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan harga BBM, dan kenaikan tarif listrik.



Perekonomian Indonesia dengan tingkat inflasi masih dibawah 10% bertahan hingga awal tahun 1997 (sebelum krisis moneter terjadi). Indonesia dengan demikian dapat dikatakan telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang cukup tinggi, khususnya pada tingkat makro dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yang tinggi, membuat laju kenaikan pendapatan per kapita menjadi cukup pesat (Prasetiantono, 1997:4). Peta pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keadaan normal sebesar 7% per tahun dengan tingkat inflasi tidak lebih dari 5% yang pernah dijuluki sebagai salah satu macan kecil Asia (*The Little Tiger*) dan negara industri baru (*Newly Industrialized Countries=NICS*), bersama-sama dengan Malaysia, Taiwan, Singapura dan Korea selatan (Hartati, 1999:68). Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dilihat pada laju pertumbuhan GDP yang tinggi mencerminkan kondisi fundamental ekonomi makro nasional.

Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang terjadi di semua negara termasuk Indonesia, dan sebagai salah satu indikator perekonomian secara umum, yang di Indonesia biasanya dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara khusus tingkat inflasi dipakai sebagai dasar pengukuran secara statistik terhadap perkembangan harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kota-kota besar di Indonesia (Rahardja, 1990:40 ). Alasan yang mendasari dipilihnya IHK adalah dari teori dan segi kepraktisan, karena merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari indeks biaya hidup konsumen.

Inflasi pada batas-batas tertentu akan mendorong pengusaha untuk lebih giat meningkatkan pendapatannya sehingga kegiatan ekonomi meningkat, tetapi apabila inflasi mencapai tingkat yang lebih tinggi dan berlangsung terus-menerus akan berakibat sebaliknya, yaitu menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menurunkan pendapatan per kapita riil (Suroso, 1997:139). Inflasi di negara-negara berkembang terjadi karena keinginan untuk mempercepat laju pembangunan dengan melaksanakan ekspansi moneter yang berlebihan yang ditujukan untuk membiayai

defisit dalam anggaran belanja pemerintah. Kebijakan ini akan memperbesar keseluruhan permintaan masyarakat dan apabila negara yang menjalankannya tidak sanggup untuk memperbesar penawaran barang-barang, maka akan terjadi kelebihan permintaan dan inflasi akan terjadi.

Pengaruh positif dari inflasi pada kenyataannya memberikan sumbangan yang lebih kecil daripada pengaruh negatifnya terhadap pembangunan. Pertama-tama, inflasi akan mengurangi kegairahan masyarakat untuk menabung, karena nilai riil tabungan mereka akan mengalami penyusutan. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga, masyarakat akan mempertinggi tingkat konsumsi sehingga dapat membeli dan menyimpan barang-barang yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Penurunan tabungan tersebut juga disebabkan karena masyarakat merubah cara penabungannya, dari tabungan dalam bentuk surat-surat berharga menjadi barang-barang tahan lama yang diharapkan akan mengalami pertambahan nilai yang dapat mengimbangi tingkat kenaikan harga-harga umum (Sukirno, 1985:369).

Pemerintah dalam usahanya untuk melanjutkan momentum pembangunan nasional khususnya mengendalikan tingkat inflasi dengan jalan menetapkan program stabilisasi melalui kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang membatasi permintaan dan mengharuskan untuk menghemat dalam bidang ekonomi, (Prawiro, 1998:35). Hal tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia tahun 1965, di mana kebijakan defisit anggaran terus diberlakukan tanpa diimbangi oleh kebijakan investasi di sektor produksi mengakibatkan inflasi mencapai 650%.

Sasaran operasional, pengendalian moneter terhadap inflasi melalui suku bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar, kredit, dan pajak sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa banyak faktor internal atau dari dalam negeri yang berpengaruh terhadap fluktuasi inflasi diantaranya jumlah uang beredar, harga bahan

pangan, fluktuasi harga minyak, defisit anggaran pemerintah, penurunan nilai rupiah, dan sebagainya.

Faktor eksternal dari luar negeri karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, tercermin dengan besarnya kegiatan perdagangan internasional dari tahun ke tahun, dengan total impor sebesar 35.247,4 juta dolar AS dan total ekspor 44.060,3 juta dolar AS (Bank Indonesia, 1998:13) tentunya memberikan peluang yang sangat besar bagi masuknya pengaruh eksternal terhadap perekonomian nasional. Struktur perekonomian Indonesia yang terbuka, sangat memungkinkan terpengaruh oleh gejolak perekonomian dunia. Fluktuasi harga maupun nilai tukar mata uang negara-negara maju memberikan pengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Sebagian besar penerimaan ekspor Indonesia dinyatakan dalam dolar Amerika, apabila hasil penerimaan ekspor tersebut dibelanjakan di dalam negeri akan berdampak pada jumlah uang beredar (*induced money stock increase*), sehingga cenderung *inflatoir*. Sebaliknya apabila dibelanjakan di luar negeri akan berpengaruh terhadap inflasi yang diimpor (*imported Inflation*) (Gunawan, 1991:56).

Jack Boorman dalam Gunawan (1991:58), mengatakan bahwa transmisi inflasi dunia ke dalam perekonomian Indonesia melalui dua jalur, yaitu peningkatan harga barang ekspor dan impor. Peningkatan harga barang ekspor akan meningkatkan penerimaan ekspor yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan domestik meningkat dan secara tidak langsung penerimaan ekspor akan menaikkan saldo neraca berjalan, selanjutnya akan menimbulkan disequilibrium di pasar uang dalam bentuk kelebihan jumlah uang beredar. Dilihat dari sisi kenaikan harga impor mempengaruhi harga dalam negeri melalui kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta karena harga-harga barang impor meningkat, dan kenaikan harga impor barang modal dan bahan baku untuk proses produksi dalam negeri menyebabkan biaya produksi naik dan mendorong kenaikan harga barang domestik.

## 1.2 Perumusan Masalah

Inflasi yang tinggi merupakan gejala dari adanya ketidakseimbangan makro dalam perekonomian yang akan mengganggu stabilitas perekonomian dalam jangka panjang. Keadaan tersebut dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia di luar negeri serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang domestik. Inflasi harus dikendalikan pada tingkat yang wajar, sehingga untuk menghindari masalah-masalah yang ditimbulkannya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, dan sumber-sumber utama penyebab inflasi harus diketahui secara pasti, agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Nopirin dalam modelnya tentang inflasi di Indonesia memasukkan variabel jumlah uang beredar, Gross Domestic Product, tingkat harga internasional serta tingkat inflasi yang diperkirakan, dan Anwar Nasution menganalisis bahwa inflasi di Indonesia disebabkan oleh defisit domestik anggaran pemerintah (Gunawan, 1991:55). Berdasarkan model inflasi Indonesia menurut Nopirin dan Anwar Nasution, permasalahan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada : seberapa besar pengaruh jumlah uang yang beredar, Gross Domestic Product (GDP), tingkat harga internasional, dan defisit domestik anggaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di Indonesia selama periode tahun 1971 sampai dengan tahun 1998.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara bersama dan secara parsial, dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengaruh dari variabel-variabel ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998;
2. Gross Domestic Product terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998;

3. tingkat harga internasional terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971- 1998;
4. defisit domestik anggaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971 - 1998;

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. bahan informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebijaksanaan anti inflasi yang sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya;
2. tambahan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

### 1.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, maka hipotesis yang digunakan adalah :

1. jumlah uang beredar berpengaruh positif dan nyata terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Gross Domestic Product berpengaruh negatif dan nyata terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
3. tingkat harga internasional berpengaruh positif dan nyata terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
4. defisit domestik anggaran pemerintah berpengaruh positif dan nyata terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dalam jangka pendek maupun jangka panjang;

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data runtut waktu (*time series*) periode tahun 1971-1998, karena pada dasarnya topik yang diteliti berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi seperti yang dikehendaki oleh teori ekonomi. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, pengujian terhadap perilaku data runtut waktu (*time series*) atau integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya pendekatan kointegrasi dan merupakan bagian penting dalam perumusan data estimasi suatu model dinamis (Eagle dan Granger dalam Insukindro, 1991:260).

Data-data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan oleh instansi yang berwenang, yang meliputi laporan Bank Indonesia, Indikator ekonomi, Statistik Indonesia BPS, *The International Financial Statistics - IFS* dan berbagai literatur pendukung lainnya.

### 1.5.2 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap tingkat inflasi di Indonesia, dapat dibentuk fungsi inflasi sebagai berikut:

$$INF = f(JUB, GDP, IPINT, GDDB)$$

Keterangan :

INF = tingkat inflasi (%);

JUB = jumlah uang beredar (Rp);

GDP = Gross Domestic Product (Rp);

IPINT = tingkat harga internasional;

GDDB = defisit domestik anggaran pemerintah (Rp).

Jika dijabarkan dalam bentuk regresi berganda model semi log adalah sebagai berikut:

$$INF_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogJUB}_t + \beta_2 \text{LogGDP}_t + \beta_3 \text{IPINT}_t + \beta_4 \text{LogGDDB}_t + \delta_t$$

Alat analisis yang digunakan adalah Pendekatan Kointegrasi, Model Linier Dinamis yaitu PAM dan ECM. Model dinamis digunakan dalam penelitian ini karena, perilaku variabel-variabel ekonomi bereaksi tidak seketika terhadap aksi. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan (Gujarati dalam Wardhono, 1998:171) sebagai berikut :

- a) psikologis, yaitu adanya kebiasaan bahwa orang tidak akan merubah perilaku secara mendadak;
- b) tehnologis, yaitu adanya unsur kesulitan secara teknis sehingga reaksi terhadap timbulnya sesuatu menjadi lamban;
- c) institusi dan kelembagaan, yaitu adanya aturan-aturan tertentu yang mengakibatkan lambatnya reaksi.

Metode yang digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square* atau OLS). Model linier OLS berpijak pada berbagai asumsi klasik, yaitu: tidak terjadi mutikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi heterokedastisitas (Supranto, 1983:88).

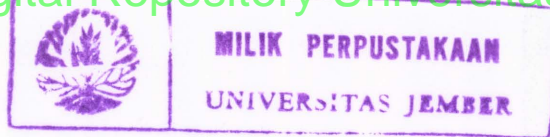
## 1. Pendekatan Kointegrasi

Pendekatan kointegrasi dipandang sebagai pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan jangka panjang antara variabel ekonomi, sehingga penting bagi perumusan dan estimasi model dinamis. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan stasioner atau tidak, karena stasioner merupakan asumsi dasar dalam analisa regresi (Engle dan Granger dalam Wardhono, 1998:173).

Kaitannya dengan pendekatan kointegrasi, ada dua prasyarat pengujian yang harus dipenuhi, yaitu uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi, yaitu sebagai berikut:

### a. uji Akar-akar Unit

Uji akar-akar unit yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Dicky-Fuller* (DF) dan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Untuk mendapatkan nilai DF dan ADF tersebut dibentuk model sebagai berikut:



$$DX_t = a_0 + a_1 BX_t + \sum_{l=1}^k b_l B^l DX_t, \dots\dots\dots(1)$$

$$DX_t = c_0 + c_1 T + c_2 BX_t + d \sum_{l=1}^k B^l DX_t, \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:  $DX_t = X_t - X_{t-1}$  ;  $BX_t = X_{t-1}$  ;  $T =$  Time Trend dan  $X_t$  adalah variabel yang diamati pada periode  $t$  dan  $B$  merupakan operasi kelambanan waktu ke hulu (*backward lag operator*),  $k$  adalah besarnya waktu kelambanan yang dihitung  $k = N^{1/3}$  dimana  $N$  adalah jumlah sampel. Nilai DF dan ADF ditunjukkan oleh nisbah  $t$  pada koefisien regresi  $BX_t$  dari persamaan tersebut. Apabila nilai DF (ADF) hitung lebih kecil dari nilai DF (ADF) tabel maka data tersebut tidak stasioner, demikian pula sebaliknya.

**b. uji Derajat Integrasi**

Bila data yang diamati tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji derajat integrasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pada derajat berapa data yang diamati stasioner, dengan model sebagai berikut:

$$D2X_t = e_0 + e_1 BDX_t + \sum_{l=1}^k f_l B^l D2X_t, \dots\dots\dots(3)$$

$$D2X_t = g_0 + g_1 T + g_2 BDX_t + h_l \sum_{l=1}^k B^l D2X_t, \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:  $D2X_t = DX_t - DX_{t-1}$  ;  $BDX_t = DX_{t-1}$  . Apabila  $e_1$  dan  $g_1$  tidak berbeda dengan satu maka variabel  $X_t$  dikatakan stasioner pada derajat satu atau I (1). Pengujian ini dilanjutkan sampai mendapatkan kondisi yang stasioner.

**c. uji Kointegrasi**

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui bahwa data tersebut berada pada derajat yang sama, misalnya  $Y_t$  dan  $X_y$  berintegrasi pada derajat satu atau I (1), sehingga diperlukan uji CRDW (*Cointegrating Regresion Durbin Watson*), DF dan ADF. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi regresi kointegrasi sebagai berikut :

$$Y_t = m_0 + m_1 X_{1t} + m_2 X_{2t} + e_t \dots\dots\dots(5)$$



Kemudian ditaksir dengan OLS:

$$De_t = \rho_1 Be_t \dots\dots\dots(6)$$

$$De_t = g_1 Be_t + \sum_{i=1}^k w_i BDe_t \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan  $De_t = e_t - e_{t-1}$  ;  $Bde_t = De_{t-1}$  Nilai statistik CRDW ditunjukkan oleh nilai DW statistik pada persamaan (5) dan statistik DF dan ADF ditunjukkan oleh nisbah t pada koefisien  $Be_t$  pada persamaan (6) dan (7). Kriteria pengujian adalah apabila nilai DF (ADF) hitung lebih besar dari nilai kritisnya, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel pada model yang dibentuk berintegrasi atau residual dari model adalah stasioner.

**2. Model Linier Dinamis**

Model linier dinamis mempunyai unsur kelambanan atau lag dalam analisisnya, sehingga unsur kelambanan tersebut dapat mencerminkan metodologi jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Adjustment Model (PAM)* dan *Error Correction Model (ECM)* yang banyak diterapkan pada penelitian di Indonesia. Kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diamati model dasar dalam jangka panjang serta keterkaitan perubahan variabel bebas dan variabel terikat (Insukindro, 1990:1).

Bentuk umum model penyesuaian parsial (PAM) dirumuskan sebagai berikut:

$$INF_t = \beta_0 + \beta_1 LogJUB_t + \beta_2 LogGDP_t + \beta_3 IPINT_t + \beta_4 LogGDDB_t + \beta_5 BINF_t + e_t \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:  $BINF_t = INF_{t-1}$

Hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$INF_t = \alpha_0 + \alpha_1 LogJUB_t + \alpha_2 LogGDP_t + \alpha_3 IPINT_t + \alpha_4 LogGDDB_t + e_t \dots\dots(9)$$

Keterangan:  $\alpha_1 = \beta_1 / (1-\beta_5)$ ,  $\alpha_2 = \beta_2 / (1-\beta_5)$ , dan seterusnya.

Spesifikasi model koreksi kesalahan (ECM) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DINF}_t = & \chi_0 + \chi_1 \text{DLogJUB}_t + \chi_2 \text{DLogGDP}_t + \chi_3 \text{DIPINT}_t + \chi_4 \text{DLogGDDB}_t \\ & + \chi_5 \text{BLogJUB}_t + \chi_6 \text{BLogGDP}_t + \chi_7 \text{BIPINT}_t + \chi_8 \text{BLogGDDB}_t \\ & + \chi_9 \text{ECT} + \delta_t \dots\dots\dots(10) \end{aligned}$$

Keterangan:  $\text{DINF}_t = \text{INF}_t - \text{INF}_{t-1}$  ;  $\text{BLogJUB}_t = \text{LogJUB}_{t-1}$  , dan seterusnya.

$$\text{ECT} = (\text{BLogJUB}_t + \text{BLogGDP}_t + \text{BIPINT}_t + \text{BLogGDDB}_t - \text{BINF}_t)$$

Hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{INF}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \text{LogJUB}_t + \gamma_2 \text{LogGDP}_t + \gamma_3 \text{IPINT}_t + \gamma_4 \text{LogGDDB}_t + e_t \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan :  $\gamma_0 = \chi_0 / \chi_9$  ;  $\gamma_1 = (\chi_5 + \chi_9) / \chi_9$  , dan seterusnya.

Validitas model ditentukan oleh nilai koefisien pada variabel ECT (*Error Correction Term*) pada persamaan dengan kaidah, apabila nilai mutlak t statistik pada koefisien ECT lebih besar dari nilai t kritis dengan *level of significance* tertentu, maka ECM valid.

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua order yang terdiri dari order satu pengujian Statistik dan order dua pengujian ekonometrik, yaitu sebagai berikut:

#### a. uji Statistik (order satu)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama digunakan uji F (F test) (Supranto, 1987:327), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{F hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots\dots\dots(12)$$

keterangan:

- $R^2$  = koefisien determinasi;
- n = jumlah sampel;
- k = jumlah variabel bebas.

Rumusan Hipotesa :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_i = 0$$

$$H_a : b_i \neq 0$$

Pengambilan keputusan : jika F hitung > F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat adalah signifikan.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, dengan anggapan variabel bebas yang lain tetap, digunakan uji t (Dajan, 1996:336) dengan formulasi sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}} \dots \dots \dots (13)$$

keterangan :

$S_{b_i}$  = simpangan baku dari variabel bebas ke- i.

Rumusan Hipotesa :

$$H_0 : b_i = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_a : b_i \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

Pengambilan keputusan : jika t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel bebas signifikan secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

#### b. uji Ekonometrik (order dua)

Uji kriteria ekonometri atau disebut uji diagnosis, dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar regresi linier, yaitu BLUE (*The Best Linear Unbiased Estimator*) yaitu memiliki tiga ketentuan seperti tidak bias, efisien dan konsisten. Beberapa uji diagnosis (Sugiyanto, 1995:78) yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. uji Multikolinearitas

Alat uji ekonometrik yang digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas sehingga sulit

untuk memisahkan pengaruh antara variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan berdasarkan uji Kleinn, yaitu dengan cara melakukan regresi sederhana antara dua variabel dengan menjadikan salah satu variabel bebas sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model adalah dengan membandingkan koefisien determinasi hasil regresi sederhana ( $r^2$ ) dengan koefisien determinasi regresi berganda ( $R^2$ ), kemungkinan adanya multikolinearitas apabila nilai koefisien determinasi hasil regresi sederhana ( $r^2$ ) lebih besar daripada koefisien determinasi regresi berganda ( $R^2$ ).

## 2. uji Heterokedastisitas

Alat uji ekonometrik yang digunakan untuk menguji model mengenai varian variabel rambang (pengganggu) dari masing-masing variabel bebas. Untuk menguji ada dan tidaknya heterokedastisitas dalam model digunakan uji Breuch-Pagan LM. Uji ini adalah uji bahwa varian dari variabel pengganggu adalah sama (homoskedastik) untuk seluruh sampel. Anggap bahwa  $V_t$  adalah  $IN(0, \sigma_t^*)$  dan  $\sigma_t^* = f(\alpha_0 + \alpha' Z_t)$ . Pengetrapan OLS pada model yang variabel pengganggunya memiliki karakteristik heteroskedastik akan menghasilkan taksiran yang tidak bias dan tidak efisien. Selain itu, inferensi yang berdasarkan taksiran OLS tidak valid karena mempergunakan taksiran varian yang keliru.

Uji statistik LM adalah sama dengan setengah dari jumlah kuadrat regresi yang dapat diterangkan (*half explained sum of square of the regression* = SSR), yang secara asimptotik memiliki distribusi Chi-square.

Hasil regresi  $\sigma_t^* = \sigma^2 f(\alpha_0 + \alpha' Z_t)$  diperoleh jumlah kuadrat regresi yang dapat diterangkan (SSR). Nilai  $\chi^2$  hitung adalah  $1/2$  (SSR). Apabila nilai  $\chi^2$  hitung  $>$   $\chi^2$  tabel maka terdapat bukti heteroskedastik.

## 3. uji Autokorelasi

Alat uji ekonometrik yang digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Breusch-Godfrey LM. Uji

ini adalah uji adanya autoregresi tingkat pertama AR(1) atau moving average MA(1) dalam variabel pengganggu. Apabila estimasi mengandung AR(1) dan MA(1) maka metode penaksir kuadrat terkecil akan menghasilkan penaksir yang tidak efisien. Statistik pengujian dapat diperoleh dengan regresi turunan (*auxiliary regression*) sebagai berikut :

$$V_t = \beta_0 + \beta_1 V_{t-1} + \sum_{i=2}^k \beta_i X_{t-i} \dots \dots \dots (14)$$

Keterangan: k adalah banyaknya variabel penjelas dalam persamaan yang diamati,  $v_t$  adalah variabel pengganggu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan hipotesis:

- Ho : tidak terdapat bukti AR(1) atau MA(1)
- Ha : terdapat bukti terdapat AR(1) atau MA(1)

BG =  $T \cdot R^2$  ,  $R^2$  adalah koefisien determinasi persamaan (14), akan memiliki distribusi yang secara asimptotik adalah Chi-Square. Untuk  $\alpha$  tertentu, bila nilai BG > nilai  $\chi^2$  tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya.

**1.6 Definisi Operasional**

Batasan-batasan pada variabel yang akan diberlakukan didalam analisis dan pembahasan data adalah sebagai berikut :

1. inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, dan dinyatakan dengan tingkat Indeks Harga Konsumen. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IHK adalah sebagai berikut :

$$\text{Inflasi}_t = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

2. jumlah uang beredar adalah jumlah uang kartal dan uang giral (M1) yang beredar di masyarakat. Menggunakan M1 karena paling likuid sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi satu rupiah);

3. Gross Domestic Product merupakan nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara, termasuk perusahaan asing yang ada di negara tersebut menurut jangka waktu tertentu, biasanya dihitung dalam waktu satu tahun;
4. tingkat harga internasional adalah tingkat harga barang-barang di pasar dunia, dan penelitian ini menggunakan indeks harga internasional yang telah disesuaikan dengan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang didasarkan pada indeks satuan nilai impor manufaktur (SITC 5-8);
5. defisit domestik anggaran pemerintah merupakan kecenderungan naiknya pengeluaran pemerintah yang tidak diimbangi atau tidak bisa dipenuhi dari penerimaan dalam negeri, sehingga pengeluaran pemerintah harus dibiayai dengan penerimaan yang berasal dari hutang luar negeri. Perkiraan defisit domestik anggaran pemerintah dalam penelitian ini didasarkan pada perkiraan overall defisit, yaitu selisih antara pengeluaran total dengan penerimaan dalam negeri.

## II. GAMBARAN UMUM INFLASI DI INDONESIA

### 2.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Tingkat inflasi di Indonesia dalam perkembangan dari tahun ke tahun selama periode tahun 1971 sampai dengan tahun 1998 cukup bergejolak. Variabel tingkat inflasi yang terjadi digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan harga barang yang terjadi. Indeks harga yang biasa digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*). Tingkat inflasi di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen dapat dilihat pada tabel 1.

Tingkat inflasi di Indonesia mencapai titik tertinggi pada tahun 1966 sebesar 635,35 %, disebabkan jumlah uang beredar yang tinggi di masyarakat dan menjadi tidak proporsional terhadap jumlah barang dan jasa. Faktor lain yang menyebabkan kondisi instabilitas adalah lemahnya struktur perekonomian dan langkanya investasi sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Perekonomian Indonesia memerlukan inflasi yang rendah atau stabilitas harga. Secara makro, stabilitas harga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, terutama di dalam memberikan iklim kondusif terhadap investasi. Secara mikro, inflasi rendah memberikan iklim kepastian rasa aman, bagi keputusan portofolio dan pemegang uang tunai (*cash*). Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya nilai mata uang, sehingga orang cenderung lebih sedikit memegang uang tunai (Prasetiantono, 1997:119). Kecenderungan ini ditandai dengan semakin seringnya orang menarik uangnya (*withdrawal*) dari ATM (*Automated Teller Machine*).

Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Indonesia  
Periode Tahun 1971 - 1998 (1990 = 100)

Tahun	IHK	Inflasi (%)
1971	9,5	4,39
1972	10,1	6,31
1973	13,3	31,68
1974	18,7	40,60
1975	22,2	18,71
1976	26,7	20,27
1977	29,6	10,86
1978	32,0	8,10
1979	37,2	16,25
1980	43,9	18,01
1981	49,3	12,30
1982	53,9	9,33
1983	60,4	12,05
1984	66,6	10,36
1985	69,8	4,80
1986	73,8	5,73
1987	80,7	8,90
1988	87,2	5,47
1989	92,8	5,97
1990	100	9,53
1991	109,4	9,52
1992	117,7	4,94
1993	132,4	9,77
1994	145,2	9,24
1995	158,2	8,64
1996	168,7	6,47
1997	188,3	11,61
1998	334,4	77,63

Sumber: International Financial Statistic, 1998.

Tingkat inflasi masa Orde Baru di bawah 5 % dicapai pada tahun 1971 sebagai inflasi terendah pertama yaitu 4,39%, kedua terjadi pada tahun 1985 sebesar 4,80% dan dengan diberlakukannya kebijakan uang ketat tahun 1992 dapat menekan laju inflasi sampai 4,94% dari 9,52% pada tahun 1991. Perjalanan perekonomian Indonesia mendapat cobaan yang berat pada pertengahan 1997 yaitu krisis ekonomi.



Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya kegiatan produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja sebagai akibat tingginya ketergantungan produsen domestik pada barang dan jasa impor. Dampak negatif selanjutnya pada permasalahan non ekonomi berupa kerusuhan sosial yang menyebabkan berbagai kerusakan baik di sektor produksi maupun jaringan distribusi, yang berdampak memburuknya iklim usaha di Indonesia. Jaringan distribusi yang tidak sepenuhnya berfungsi disertai dengan *panic buying* telah menyebabkan munculnya ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga-harga secara berkelanjutan, tercermin pada tingkat inflasi yang melonjak hingga 77,63% pada tahun 1998.

## 2.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia

Indonesia menganut konsep jumlah uang beredar M1 (*narrow money*), dimana uang kuasi yang berupa deposito berjangka dan tabungan bukan merupakan komponen jumlah uang beredar, melainkan hanya sebagai bagian dari likuiditas perbankan (Gunawan., 1991:61). M1 mempunyai sifat dapat dipergunakan sewaktu-waktu atau setiap saat sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan jumlah uang beredar beserta komponen-komponennya tahun 1971-1998 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. menunjukkan rata-rata M1 sebesar 20.319,5 miliar rupiah per tahun dengan rincian rata-rata jumlah uang kartal 8.405 miliar rupiah dan rata-rata uang giral 12.697,5 miliar rupiah per tahun.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Beserta Komponen dan Laju Pertumbuhannya Periode Tahun 1971-1998 (Miliar rupiah)

Tahun (1)	Jumlah Uang Beredar			Laju Pertumbuhan (%)		
	Kartal (2)	Giral (3)	M1 (4)	Kartal (5)	Giral (6)	M1 (7)
1971	198	115	313			
				37,3	73,0	50,4
1972	272	199	471			
				7,7	88,9	42,0
1973	293	376	669			
				68,2	17,8	40,5
1974	493	443	940			
				26,7	41,0	30,8
1975	625	625	1.250			
				24,8	31,2	28,0
1976	780	820	1.600			
				25,5	24,5	25,3
1977	979	1.021	2.060			
				25,8	22,3	24,0
1978	1.232	1.249	2.488			
				25,8	46,8	35,8
1979	1.550	1.834	3.379			
				38,8	54,9	48,0
1980	2.152	2.842	5.001			
				18,7	38,2	29,4
1981	2.555	3.930	6.474			
				10,3	6,5	6,4
1982	2.818	4.187	6.890			
				19,4	0,5	9,9
1983	3.365	4.211	7.576			
				26,5	2,6	13,2
1984	4.257	4.324	8.581			
				4,2	31,3	17,9
1985	4.438	5.686	10.124			
				24,1	7,6	14,8
1986	5.510	6.121	11.631			
				4,9	12,7	9,2
1987	5.782	6.903	12.705			

dilanjutkan ke halaman berikutnya.....

lanjutan Tabel 2:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1987	5.782	6.903	12.705			
				8,0	18,0	13,2
1988	6.246	8.146	14.392			
				18,6	55,7	42,8
1989	7.426	12.688	20.559			
				22,4	16,0	15,8
1990	9.094	14.725	23.819			
				2,7	15,4	12,0
1991	9.346	16.996	26.691			
				7,2	2,7	2,9
1992	10.025	17.460	27.485			
				57,1	3,0	22,7
1993	15.753	17.986	33.739			
				18,2	48,6	22,8
1994	18.634	26.740	41.462			
				11,6	19,2	13,6
1995	20.807	31.870	47.135			
				8,0	30,5	9,5
1996	22.487	41.602	51.652			
				26,4	19,9	51,6
1997	28.424	49.919	78.343			
				45,6	19,8	291,7
1998	41.394	59.803	101.197			

Sumber: International Financial Statistic, 1998.

Sementara itu rata-rata pertumbuhan M1 sebesar 34,3%, laju pertumbuhan terendah tahun 1992 sebesar 2,9 % yang merupakan hasil dari kebijakan uang ketat yang diberlakukan pada tahun 1990 dan tertinggi pada tahun 1998 sebesar 291,7 % yang disebabkan karena peningkatan harga-harga sehingga masyarakat cenderung untuk memegang uang dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan yang ditandai penarikan besar-besaran dana di bank (*rush*). Rincian rata-rata pertumbuhan uang kartal sebesar 22,7 % per tahun dan uang giral 27,7 % per tahun. Pertumbuhan uang kartal relatif tinggi disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya fasilitas pelayanan perbankan seperti ATM, peningkatan kegiatan

perdagangan besar yang sebagian besar transaksinya menggunakan uang tunai serta besarnya transaksi di sektor produksi yang sebagian besar dilakukan secara tunai, tetapi pertumbuhan uang giral jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan uang kartal.

Tingginya pertumbuhan uang giral memberikan indikasi bergesernya sektor moneter Indonesia ke arah sektor moneter yang lebih modern di mana alat transaksi yang dipergunakan dalam dunia perdagangan semakin maju. Peningkatan jumlah dan pertumbuhan uang giral menjadi pendorong masyarakat dalam perekonomian yang semakin maju untuk lebih menyukai uang giral sebagai alat pembayaran (alasan praktis dan keamanan).

### **2.3 Perkembangan Gross Domestic Product di Indonesia**

*Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai (dalam uang) barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu, yang biasanya selama satu tahun (Nopirin, 1994:63). GDP menitikberatkan wilayah, dalam arti mencakup semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia (domestik) baik oleh penduduk Indonesia maupun oleh penduduk asing. Untuk dapat mencerminkan pertumbuhan hasil produksi (output) yang sesungguhnya terjadi, maka GDP dinyatakan dalam nilai riilnya. GDP riil benar-benar menunjukkan hasil dari seluruh sektor yang ada di dalam negeri (Partadiredja, 1977:15). Perkembangan GDP riil di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3. Periode penelitian pada tahun 1971-1998 tercatat rata-rata pertumbuhan GDP riil adalah sebesar 5,97%, dengan pertumbuhan terbesar tahun 1973 sebesar 10,3 % dan terendah yang berupa pertumbuhan negatif terjadi tahun 1998 sebesar -13,7 yang dikarenakan krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Tabel 3. Perkembangan Gross Domestic Product Riil Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1990 di Indonesia Periode tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah)

Tahun	GDP Riil (Miliar rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1971	61.337	9,4
1972	67.117	10,3
1973	74.008	8,7
1974	80.411	4,9
1975	84.413	6,9
1976	90.277	8,7
1977	98.132	7,8
1978	105.826	6,3
1979	112.446	9,8
1980	123.556	7,9
1981	133.350	2,4
1982	136.340	4,2
1983	142.036	6,9
1984	151.971	2,5
1985	155.714	5,8
1986	164.863	4,9
1987	172.983	

dilanjutkan ke halaman berikutnya.....

lanjutan Tabel 3.

(1)	(2)	(3)
1987	172.983	
		5,7
1988	182.982	
		7,3
1989	196.427	
		7,3
1990	210.866	
		6,9
1991	225.522	
		6,4
1992	240.090	
		6,4
1993	255.687	
		7,5
1994	354.442	
		8,2
1995	383.792	
		7,9
1996	413.797	
		4,6
1997	434.095	
		-13,7
1998	374.719	

Sumber : International Financial Statistic, 1998.

Selama tahun 1971-1997, GDP riil Indonesia telah melesat dari Rp 61.377 miliar menjadi Rp 434.095 miliar sehingga terjadi pertumbuhan rata-rata 6,87 % per tahun, dengan pertumbuhan yang menakjubkan ini Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara Asia yang dijuluki *High Performing Asian Economies*. Menurut Alkadri (1999:1) perjalanan perekonomian Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu, periode stabilisasi dan rehabilitasi (1967-1972), zaman keemasan minyak (1973-1982), fase gejolak eksternal (1983-1986), era kebangkitan ekspor non migas (1987-1996) dan mulai tahun 1997 adalah gejolak krisis ekonomi.

Fluktuasi laju pertumbuhan GDP riil yang bervariasi ini mencerminkan pertumbuhan *output*. Pertumbuhan *output* nasional yang juga menggambarkan kemampuan memproduksi dalam negeri dapat mempengaruhi inflasi, terutama apabila terjadi ketidakseimbangan antara *output* yang dihasilkan dengan permintaan agregatnya (*aggregate demand*).

#### 2.4 Tingkat Harga Internasional

Tingkat inflasi yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar negeri disebut *imported inflation* atau inflasi yang diimpor. Inflasi jenis ini dapat timbul melalui dua jalur yaitu jalur harga ekspor dan harga impor. Bank dunia secara resmi menggunakan indikator *Unit Value Index of Manufactured Export* (SITC 5-8) dari negara maju ke negara berkembang untuk menganalisis tingkat inflasi dunia (Gunawan, 1991:108). Indeks harga internasional ini, setelah disesuaikan dengan perubahan nilai tukar valuta asing, dalam hal ini kurs rupiah terhadap dolar Amerika, digunakan sebagai indikator inflasi yang diimpor.

Industri manufaktur (*manufacturing industry*) merupakan salah satu industri pengolahan non migas strategis yang harus dikembangkan, karena kontribusinya terhadap penerimaan devisa semakin diperhitungkan karena memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap perekonomian. Secara makro, mampu menyerap relatif banyak tenaga kerja dan diharapkan memperkuat struktur industri nasional. Perkembangan industri manufaktur dalam negeri didorong oleh peningkatan permintaan terhadap produksi manufaktur, baik di pasar domestik maupun internasional (Prasetiantono, 1997:215). Perkembangan ekspor dan impor sektor industri digunakan data ekspor dan impor hasil industri manufaktur, meliputi SITC 5-8 yang berlaku secara internasional. SITC 5 adalah bahan kimia, SITC 6 bahan industri, SITC 7 mesin dan alat pengangkutan dan SITC 8 hasil industri lainnya.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Hasil Industri Manufaktur di Indonesia Periode tahun 1971-1998 (Juta US \$)

Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai (juta US \$)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta US \$)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1971	233		502	
1972	327	40,3	761	51,5
1973	321	19,5	1.729	127,2
1974	426	8,9	2.841	64,3
1975	402	13,2	2.769	4,5
1976	547	13,5	3.673	23,7
1977	852	55,7	3.230	-12,0
1978	864	1,4	3.669	13,6
1979	959	10,9	4.202	14,5
1980	1.342	39,9	7.834	86,4
1981	1.593	18,7	9.216	17,6
1982	1.765	10,7	11.172	21,2
1983	1.815	2,8	10.305	-8,7
1984	2.330	278,3	9.438	-8,4
1985	1.949	-16,3	7.584	-19,6
1986	2.985	52,1	8.084	6,5
1987	4.307	44,2	9.399	16,6

dilanjutkan pada halaman berikutnya.....



lanjutan Tabel 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1987	4.307		9.399	
		37,1		7,9
1988	5.907		10.150	
		29,9		21,8
1989	7.679		12.372	
		-41,5		37,6
1990	4.486		17.072	
		171,9		18,2
1991	12.200		20.181	
		34,9		5,2
1992	16.467		21.240	
		19,8		4,4
1993	19.735		22.177	
		6,8		11,2
1994	21.081		24.671	
		12,2		24,1
1995	23.666		30.636	
		21,4		2,2
1996	28.737		31.323	
		-17,3		-0,2
1997	23.190		31.265	
		-6,0		-4,2
1998	21.786		17.937	

Sumber : BPS, beberapa penerbitan.

Pertumbuhan impor sektor industri manufaktur Indonesia rata-rata pertahun adalah 19,525 %, lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekspornya yaitu sebesar 31,94 % selama periode tahun 1971 sampai tahun 1998. Pertumbuhan impor sektor industri manufaktur terendah terjadi pada tahun 1985 sebesar -19,6 % dan tertinggi dicapai pada tahun 1973 sebesar 127,2 %. Masa tahun 70-an merupakan awal dari pemerintahan orde baru yang mencanangkan berbagai program rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian. Ketika itu pemerintah menempuh kebijakan orientasi ke luar secara moderat (*moderately outward oriented*) yang antara lain ditandai dengan peningkatan hutang luar negeri, kebijakan substitusi impor di bidang perdagangan dan industri, liberalisasi investasi asing dan domestik, penyesuaian nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS tanggal 21 Agustus 1971, dan kebijakan rasionalisasi beberapa BUMN (Pangestu, 1996:2). Keberhasilan perdagangan internasional Indonesia salah satunya dapat dilihat dari lebih kecilnya pertumbuhan impor dan tingginya ekspor sektor industri manufaktur.

## 2.5 Perkembangan Anggaran Pemerintah di Indonesia

Perekonomian Indonesia menghadapi kendala struktural, terutama masalah finansial. Sektor swasta yang belum kuat menyebabkan peranan anggaran pemerintah sangat menentukan investasi masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam APBN masih merupakan keharusan bagi tumbuhnya investasi masyarakat. Tetapi pengeluaran ini tidak diimbangi penerimaan, sehingga timbul defisit struktural dalam keuangan negara (kesenjangan pendapatan belanja negara). Sejak orde baru, kesenjangan pendapatan belanja negara dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang memungkinkan terjadinya inflasi (Gunawan, 1991:86). Penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dalam negeri.

Pemerintah membagi penerimaan dalam anggarannya menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pos penerimaan pembangunan adalah aliran masuk yang berasal dari bantuan luar negeri dapat berupa bantuan proyek dan bantuan program. Sementara itu, penerimaan pajak pemerintah selalu lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah dalam setiap periode anggaran. Konsekuensinya, terjadi defisit anggaran, dengan demikian anggaran pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai anggaran berimbang. Secara ekonomi, pemerintah sebenarnya menganut prinsip anggaran defisit (*defisit budget*), yang dapat menjadi berimbang karena adanya faktor bantuan luar negeri. Realisasi anggaran penerimaan pemerintah Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Pemerintah Tahun Anggaran 1971/1972-1998/1999 di Indonesia (Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Pengeluaran Rutin	Tabungan Pemerintah	Bantuan Luar Negeri	Dana Pembangunan	Pengeluaran Pembangunan
1971/72	428,0	349,1	78,9	135,5	224,4	195,9
1972/73	590,6	438,1	152,5	157,8	310,3	298,2
1973/74	967,7	713,3	254,4	203,9	458,3	450,9
1974/75	1.753,7	1.016,1	737,6	232,6	969,6	961,8
1975/76	2.241,9	1.332,6	909,3	491,6	1.400,9	1.397,7
1976/77	2.906,0	1.629,8	1.267,2	783,8	2.060,6	2.054,5
1977/78	3.535,4	2.148,9	1.386,5	773,4	2.159,9	2.156,8
1978/79	4.266,1	2.743,7	1.522,4	1.035,5	2.557,9	2.556,6
1979/80	6.696,8	4.061,8	2.635,0	1.381,1	4.016,1	4.014,2
1980/81	10.227,0	5.800,0	4.427,0	1.493,8	5.920,8	5.916,1
1981/82	12.212,6	6.970,6	5.235,0	1.709,0	6.944,0	6.940,1
1982/83	12.418,3	6.996,3	5.422,0	1.940,0	7.362,0	7.359,6
1983/84	14.432,7	8.411,8	6.020,9	3.882,4	9.903,3	9.899,1
1984/85	15.905,5	9.429,3	6.476,5	3.478,3	9.954,4	9.952,2
1985/86	19.252,5	11.951,2	7.301,7	3.572,3	10.873,3	10.873,4
1986/87	17.385,8	14.423,5	2.962,0	5.513,1	8.475,2	9.041,4
1987/88	20.803,1	17.782,0	3.321,0	6.158,2	9.479,3	9.477,2
1988/89	22.999,0	20.774,5	2.225,2	9.991,1	12.216,6	12.251,7
1989/90	28.940,4	24.331,5	9.549,4	9.905,1	19.453,7	17.452,4
1990/91	39.546,2	29.998,8	9.548,1	9.905,2	19.435,2	17.452,4
1991/92	41.585,5	30.227,3	4.358,0	10.409,8	21.767,5	20.265,5
1992/93	47.454,6	33.468,6	13.484,4	10.716,0	24.200,0	24.135,3
1993/94	52.280,5	38.799,7	3.481,1	10.372,1	30.853,5	25.661,2
1994/95	61.370,3	43.179,1	18.191,2	10.983,2	29.174,0	29.163,0
1995/96	71.558,2	52.541,0	19.017,5	11.170,0	30.187,1	29.812,0
1996/97	78.203,0	56.115,5	22.085,2	12.418,1	34.562,4	34.503,3
1997/98	88.061,1	62.159,3	25.902,2	13.026,2	38.298,2	38.928,1
1998/99	108.184,4	84.607,7	23.577,2	23.817,1	23.817,2	46.938,0

Sumber : BPS, beberapa penerbitan.

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak adalah dengan menetapkan kebijakan pembaharuan pajak pada tahun 1983. Usaha pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak tetap memperhatikan asas keadilan, kemampuan dan manfaat.

## 2.6 Perkembangan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia

### 2.6.1 Kebijakan Moneter di Indonesia

Stabilitas ekonomi makro sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan, karenanya usaha yang konsisten untuk mencapai stabilitas telah dilakukan selama bertahun-tahun (Djiwandono, 1997:54). Lima kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. mengusahakan anggaran berimbang yang menghindari pinjaman domestik untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah;
2. mempertahankan kebijakan moneter yang berhati-hati untuk mengontrol agregate moneter;
3. menjaga kurs tukar yang realistis untuk memastikan bahwa komoditas ekspor Indonesia kompetitif dan untuk membuat mekanisme pasar berjalan di pasar valuta asing;
4. mempertahankan kemudahan masuknya modal asing (*Open Capital Account*) sejak tahun 1971, yang telah membantu menarik investasi dan memastikan bahwa Indonesia tanggap terhadap perubahan kondisi di pasar dunia;
5. pemerintah telah berhasil mengenali dan menanggapi secara tepat perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang ekonomi baik domestik dan internasional.

Pemerintah untuk dapat mengantisipasi besarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat sebelum tahun 1983, menerapkan kontrol moneter dengan menggunakan batas tertinggi (*ceiling*) terhadap kredit bank (ekspansi aktiva netto), menentukan tingkat suku bunga bank-bank pemerintah dan menyediakan kredit likuiditas (dengan tingkat bunga yang disubsidi) pada sektor-sektor tertentu. Kontrol moneter dilaksanakan dengan instrumen moneter langsung sebagai usaha untuk mengontrol inflasi domestik. Kebijakan ini menghalangi mobilisasi dana dan tidak kondusif untuk memajukan industri perbankan yang dinamis. Tindak lanjut dan peningkatan efektifitas kebijakan moneter maka, pada tanggal 27 oktober 1988, pemerintah

melakukan serangkaian tindakan-tindakan penyesuaian dalam bidang keuangan, kontrol moneter dan perbankan. Kebijakan yang dikenal dengan Pakto 88 ini ditujukan untuk memobilisasi dana agar lebih intensif dan efisien, yang memberikan kemudahan pada bank dan lembaga keuangan non bank untuk membuka kantor-kantor cabang, serta pendirian bank-bank swasta baru dan bank perkreditan rakyat dimana persyaratan cadangan minimum diturunkan dari 15% menjadi 2%. Pakto 88 ini juga meliputi tindakan pemberian ijin pada bank untuk melakukan kegiatan valuta asing, membuka kantor cabang pembantu bagi bank asing dan pendirian bank patungan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan dalam negeri.

Sistem kredit nasional pada Januari 1990 diperbaiki dengan merampingkan kredit likuiditas pada tiga bidang utama yaitu pengadaan pangan, koperasi dan investasi. Kebijakan ini ditujukan untuk:

1. menurunkan tekanan inflasi dan kelebihan likuiditas yang dapat berakibat negatif terhadap mobilisasi tabungan ;
2. memperbaiki struktur kredit;
3. menghilangkan distorsi-distorsi dalam mekanisme pasar dan menciptakan tingkat bunga yang beorientasi pasar;
4. meningkatkan efisiensi alokasi dana;
5. meningkatkan peran bank nasional dalam sistem kredit nasional;
6. meningkatkan peran Bank Indonesia dalam kontrol moneter.

Paket Kebijakan pada tahun 1990, merupakan awal dari ditetapkannya kebijaksanaan uang ketat (*Tigh Money Policy*). Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. menaikkan suku bunga SBI dari rata-rata 12% menjadi 17%;
2. menarik kembali kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI);
3. gebrakan Sumarlin II, mengharuskan kepada 12 badan usaha milik negara untuk menarik dana depositonya dari bank-bank pemerintah yang dipergunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Usaha berikutnya yang dilakukan Bank Indonesia di akhir bulan Februari 1991 (Paktri 91) adalah pengetatan likuiditas dan ketentuan untuk menyetatkan perbankan melalui CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 8% serta LDR (*Loan to deposit Ratio*) kurang dari 100%. Undang-undang Perbankan baru diluncurkan pada akhir Maret 1992 yang berisi bahwa bank nasional dikelompokkan menjadi bank komersial, bank perkreditan rakyat dan bank dengan sistem bagi hasil. Peraturan-peraturan selanjutnya diterbitkan tahun 1996 untuk lebih memperkuat industri perbankan. Sebagian besar pengaturan tersebut adalah peraturan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga perbankan, merestrukturisasi dan mengkonsolidasi industri perbankan, mendorong keterbukaan dan usaha-usaha menuju perbankan yang mampu mengatur diri sendiri (*self regulatory banking*). secara umum, sektor perbankan Indonesia dicirikan oleh tingginya tingkat konsentrasi dari penguasaan asset, dana pihak ketiga maupun total kredit (Wahono, 1997:34). Tahun 1996, 20 bank terbesar menguasai 75,84% dari total asset, 74,07% dari total dana pihak ketiga dan 73,65% dari total kredit, terdapat 239 bank terdiri dari 7 bank pemerintah, 27 bank pembangunan daerah, 205 bank swasta terdiri dari bank nasional dan swasta asing dan campuran.

Ekonomi Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh pemanasan (*overheating*) sebagaimana ditunjukkan dengan defisit transaksi berjalan yang makin besar dan tingkat inflasi tinggi, maka pada bulan Juli 1997 perkembangan moneter berubah cepat sebagai akibat meningkatnya tekanan-tekanan depresiatif terhadap nilai tukar rupiah, sehubungan dengan itu kebijakan moneter diarahkan untuk memperketat likuiditas perekonomian dalam upaya menghambat kecenderungan merosotnya nilai tukar. Suku bunga meningkat tertinggi dialami oleh SBI berjangka waktu satu bulan yang naik sekitar 11,12% menjadi 30,00%. Bank Indonesia telah memperketat pemberian kredit likuiditas dengan menjadwalkan ulang atau menunda penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia yang berjumlah besar pada bank-bank. Langkah pengetatan likuiditas ini juga didukung oleh pemerintah dengan menempatkan dana BUMN

sebesar 3,4 triliun rupiah ke dalam SBI, dan dilanjutkan pada tanggal 23 Maret 1998 menaikkan tingkat bunga SBI yang berakibat meningkatnya tingkat bunga deposito dan kredit. Kebijakan-kebijakan moneter ini ditujukan untuk menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga laju inflasi dapat terkendali.

### 2.6.2 Kebijakan fiskal di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 60-an masih terbatas karena kondisi perekonomian sangat lemah, sehingga menyebabkan penerimaan negara sangat rendah. Penerimaan negara 40 % bersumber dari hasil pungutan pajak tidak langsung dan kegiatan perdagangan luar negeri. Peran pajak langsung sekitar 20% dari penerimaan, karena keterbatasan administrasi dan basis pajak. Kemampuan yang terbatas tersebut, menimbulkan dorongan untuk melakukan anggaran defisit yang dibiayai oleh pencetakan uang, yang mendorong inflasi tinggi. Untuk mengatasi inflasi yang tinggi tersebut pada bulan Desember 1965, pemerintah melakukan *sanering*, sehingga uang yang sebelumnya bernilainya Rp 1000,- diturunkan nilainya menjadi Rp 1,-. Menjelang akhir orde lama, perekonomian praktis lumpuh dan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara memadai. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah merosot secara drastis. Anggaran negara yang seharusnya dapat berperan sebagai penggerak perekonomian menjadi kurang berfungsi. APBN belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi redistribusi, alokasi dan stabilisasi yang dinamis.

Kelahiran orde baru sejak bulan oktober 1966 melalui program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, melakukan penataan kembali perekonomian. Program ini dilaksanakan dengan skala prioritas : pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor dan pencukupan kebutuhan sandang. Pemerintah menentukan beberapa kebijakan dibidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja negara antara lain adalah sebagai berikut (Usman, 1997:62) :

1. APBN dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa jumlah pengeluaran tidak boleh melebihi jumlah penerimaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
2. tabungan pemerintah diusahakan meningkat dengan tujuan agar kemandirian dalam membiayai pembangunan makin meningkat, dengan kata lain ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan semakin berkurang;
3. basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur guna menghindari pengalaman yang kurang menyenangkan pada tahun 60-an;
4. prioritas alokasi pembiayaan pembangunan diberikan pada proyek-proyek yang produktif, sedangkan pengeluaran rutin diusahakan penghematan, demikian pula subsidi kepada perusahaan negara dibatasi;
5. kebijakan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimum sumber-sumber dalam negeri, termasuk tenaga kerja untuk mengembangkan produksi dalam negeri. Produsen dalam negeri dalam hal ini diberi rangsangan fiskal dan non fiskal agar lebih banyak menggunakan teknologi produksi yang padat karya dan diberikan proteksi terhadap persaingan barang luar negeri.

Reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983, maka rangsangan fiskal sudah tercakup didalam undang-undang perpajakan yang baru ini. Kronologis kebijakan dibidang perpajakan adalah sebagai berikut : No.07/1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah; januari 1984 melalui UU No. 06 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; selanjutnya tahun 1986 diberlakukan UU No.12/1985 tentang bea materai; Paket Kebijakan bulan Mei 1990, Paket Kebijakan bulan Juni 1993 dan Paket Kebijakan bulan Oktober 1993, dilakukan penyempurnaan tarif bea masuk untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk



ekspor di pasaran internasional; UU No.7/1994 tentang Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku adalah 10% bagi yang berpendapatan sampai 25 juta rupiah, 15% lebih dari 25 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah dan 30% untuk yang berpenghasilan lebih dari 50 juta rupiah; UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, yang dipakai sebagai dasar pengaturan transaksi impor/ekspor dan pemungutan bea masuk.

Upaya peningkatan penerimaan pajak juga dilakukan melalui peningkatan daya guna dan hasil guna dari sistim perpajakan yang meliputi komputerisasi administrasi perpajakan, pemberian kepastian hukum, perluasan basis pengenaan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, penyederhanaan sistim perpajakan, meningkatkan unsur keadilan dalam sistim perpajakan dan mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari sektor migas. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 0% pada tahun 1998, diikuti oleh kebijakan yang dapat menyelamatkan lapisan masyarakat marjinal dari ancaman pengangguran melalui program padat karya (*safety net policy*) atau kebijakan jaringan pengaman, revisi target inflasi 9% menjadi 20% dan subsidi bahan bakar minyak pada RAPBN 1998/1999 sebesar 10 trilyun rupiah, secara bertahap akan dikurangi.

### III. LANDASAN TEORI

#### 3.1 Definisi dan Pengertian Inflasi

Banyak sekali definisi inflasi yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Komerchen, (1984:362). yang menyatakan bahwa :

*"inflation represents a persistent rise in the average level of price which is not metched by a proportionate increase in the level of the qualify of goods and service consumed."*

Jadi inflasi menggambarkan peningkatan harga rata-rata yang tidak diimbangi dengan peningkatan yang proporsional dari kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi.

Definisi tersebut sejalan dengan definisi Venieris dan Sebold (1987:603) yang mengatakan bahwa inflasi adalah:

*"a sustained tendency for the general level of prices to rise over time"*.

Beberapa pengertian yang patut digarisbawahi dari definisi tersebut adalah mencakup aspek-aspek :

1. *tendency*, diartikan sebagai kecenderungan harga-harga yang meningkat artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga. Namun demikian tingkat harga tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat;
2. *sustained*, peningkatan harga tersebut tidak saja terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama;
3. *general level of price*, tingkat harga yang dimaksudkan adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya harga dari satu macam barang saja.

#### 3.2 Indikator dan Metode Perhitungan Inflasi

Ada beberapa tahap indikator yang biasa digunakan oleh para ahli ekonomi untuk menggambarkan terjadinya inflasi diantaranya adalah Indeks Biaya Hidup (IBH= *Cost of Living Price Index*), Indeks Harga Konsumen (IHK= *Consumer Price*

Index), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (*GDP Deflation*) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (*IHPB=Whole Sale Price Index*). Masing-masing ukuran tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan serta sangat tergantung pada tujuan pemakaiannya. Bila dimaksudkan untuk penetapan upah buruh riil maka lebih tepat digunakan IBH atau IHK, sedangkan bila dimaksudkan untuk pembuatan kontrak-kontrak kerja dan penyesuaian harga bagi kontrak yang dilakukan oleh kontraktor besar biasanya digunakan IHPB (Gunawan, 1991:36).

IBH dan IHK mengukur biaya atau pengeluaran yang harus ditanggung oleh rumah tangga untuk membeli sejumlah barang dan jasa dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan IHPB menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi masuk kedalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan IHPB ini searah dengan perubahan IBH. Berbeda dengan indeks sebelumnya, GDP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang lebih banyak, karena selain memasukkan barang-barang konsumsi, barang-barang modal, ekspor barang dan jasa, yang semuanya merupakan barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GDP (Nopirin, 1994:26).

Sementara itu untuk melakukan perhitungan inflasi secara bulanan terdapat beberapa metode (Widodo, 1989:35), yaitu sebagai berikut:

1. metode point to point (*Point to Point Method*), yaitu perbandingan indeks akhir suatu periode dengan indeks akhir periode yang lalu. Metode ini digunakan bila indeks yang diperoleh tidak selalu berfluktuasi, sehingga trend yang didapat bisa mewakili indeks secara keseluruhan. Metode ini membandingkan secara langsung IHK antara bulan-bulan yang dibandingkan. Metode ini disebut juga sebagai *December to December Method*. Perhitungan indeks ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Inflasi}_{1990} = \left( \frac{\text{IHK}_{\text{Des1990}}}{\text{IHK}_{\text{Des1989}}} \times 100\% \right) - 100\%$$

2. metode rata-rata indeks (*Avarage to Avarage method*), yaitu membandingkan rata-rata indeks suatu periode dengan rata-rata indeks periode sebelumnya. Metode ini lebih sesuai dipergunakan untuk indeks yang fluktuasinya cukup besar. metode ini menggunakan perbandingan rata-rata IHK selama setahun dengan rata-rata IHK tahun sebelumnya atau ditulis sebagai berikut :

$$\text{Inflasi}_{1990} = \left( \frac{\text{IHK}_t}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\% \right) - 100\%$$

3. metode kombinasi point to point dan rata-rata indeks, yaitu mengkombinasikan metode point to point dengan metode rata-rata indeks. metode ini sesuai pada indeks yang fluktuasinya sangat tajam.
4. metode komulatif (*Commulative Method*), yaitu dengan menjumlahkan indeks bulanan selama satu tahun periode bersangkutan. Metode ini menghitung inflasi yang terjadi setiap bulan dari Januari-Desember. Angka inflasi yang sekarang dikeluarkan pemerintah dihitung dengan menggunakan metode komulatif.

### 3.3 Klasifikasi Inflasi

Gejala perkembangan inflasi cenderung sama untuk semua perekonomian yaitu berupa kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Akan tetapi dari sudut pandang tertentu, inflasi antara suatu negara dengan negara yang lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda, dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis (Boediono, 1994:156), yaitu sebagai berikut:

1. berdasarkan parah tidaknya, dibedakan menjadi :
  - a) inflasi ringan (di bawah 10% setahun);
  - b) inflasi sedang (antara 10-30% setahun);
  - c) inflasi berat (antara 30-100% setahun);
  - d) hiperinflasi (di atas 100% setahun);

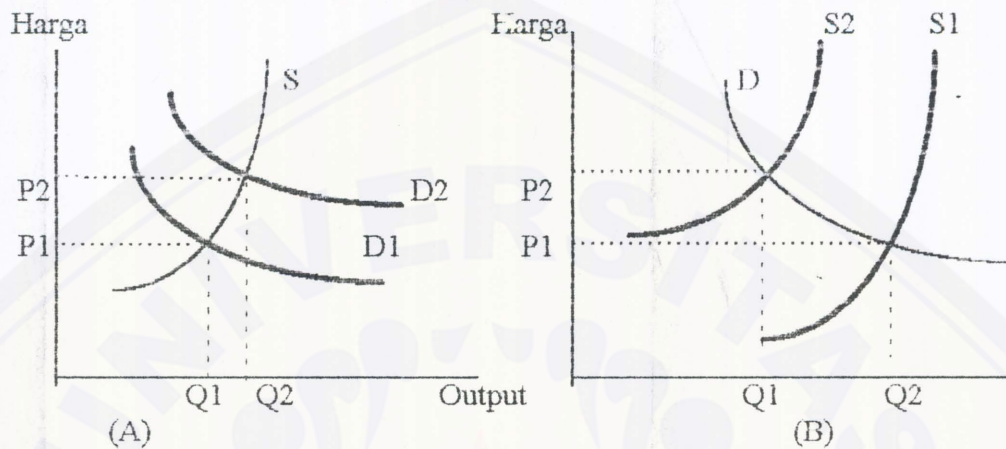
2. berdasarkan asal, dibedakan menjadi :

- a) inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), misalnya karena defisit domesrik snggaran pemerinah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.
- b) inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), adalah yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang diimpor mengakibatkan pertama, secara langsung kanaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor; kedua, secara tidak langsung manaikkan indeks harga melalui kanaikan ongkos produksi (dan kemudian harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost inflation*); ketiga, secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga didalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah dan swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*). Inflasi dari luar negeri dapat pula akibat dari kenaikan harga-harga ekspor, pertama bila harga barang ekspor naik maka indeks biaya hidup akan naik pula. Kedua, bila harga barang ekspor naik maka ongkos produksinya juga ikut naik (*cost inflation*). Ketiga, kenaikan harga barang ekspor berarti kenaikan pendapatan eksportir, yang digunakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) dan apabila barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga barang-barang lain akan naik pula (*demand inflation*).

3. berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkan, dibedakan menjadi :

- a) *demand push inflation*, inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Gambar 1 (A) menggambarkan *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*agregate demand*) bertambah (misalnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang

dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D1 ke D2. Akibatnya, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2.



Gambar 1. Demand Push Inflation (A) dan Cost Push Inflation (B)

Sumber : Boediono, 1994: 156

- b) *cost push inflation*, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, ditunjukkan pada Gambar 1 (B). Ongkos produksi naik (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S1 ke S2.

### 3.4 Teori Inflasi

Analisis data tentang inflasi mempunyai dua jalur yang berbeda. Pertama, analisis yang memusatkan perhatian pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi, serta menelusuri sebab-sebab yang bersifat ekonomi politik dari jumlah uang beredar. Kedua, menganalisa inflasi secara struktural institusional berdasarkan konsep sosiologi terhadap manusia. Kedua kelompok ini menyatakan bahwa gerakan upah buruh lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan, serikat buruh, serta

meningkatnya aspirasi masyarakat atau bahkan pertentangan sosial karena kesenjangan pendapatan (Iswardono, 1996:214).

Secara garis besar ada dua kelompok teori inflasi, masing-masing teori menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori yang lengkap, yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga. Namun masing-masing teori dapat digunakan sebagai alat analisis mengenai masalah inflasi pada keadaan ekonomi tertentu (Boediono, 1994:167). Kedua teori tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut : Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Inflasi akan berhenti dengan sendirinya, bila jumlah uang tidak ditambah. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan yaitu sebagai berikut :

- a) Keadaan pertama, bila masyarakat tidak mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya yang tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Keadaan seperti ini, kenaikan jumlah uang yang beredar sebesar 10% diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar, misalnya 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung;
- b) Keadaan kedua adalah masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan

tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang. Secara keseluruhan hal tersebut berarti adanya kenaikan permintaan akan barang-barang. Akibat selanjutnya adalah naiknya harga barang-barang. Kenaikan jumlah uang sebesar, misalnya 10% akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang sebesar 10% pula. Keadaan seperti ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan orang-orang mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi yang baru;

- c) Keadaan ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang semakin meluas dikalangan masyarakat. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation yang menaik*). Kenaikan jumlah uang yang beredar sebesar, misalnya 20% akan mengakibatkan kenaikan harga-harga lebih besar daripada 20%.

## 2. teori Strukturalis

Golongan Strukturalis pada hakekatnya berpendapat bahwa inflasi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam stuktur ekonominya. Ketidakmampuan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan produksi mereka dengan cepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perubahan-perubahan dalam permintaan dapat menyebabkan inflasi. Sektor yang paling tidak mampu untuk menambah produksi untuk memenuhi pertambahan permintaan atas barang-barang yang dihasilkannya adalah sektor pertanian. Penduduk yang terus menerus bertambah, dan perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke kota untuk bekerja di sektor industri, akan menaikkan permintaan atas bahan makanan. Rendahnya tingkat produktifitas, dan beberapa faktor lainnya yang menghambat perkembangan kegiatan di sektor pertanian, tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan



yang bertambah tersebut. Sebagai akibatnya harga-harga makanan akan naik, dan akan menimbulkan tuntutan untuk menaikkan tingkat upah di sektor industri dan menyebabkan kenaikan ongkos produksi di sektor industri. Maka harga-harga barang industri akan mengalami kenaikan pula.

Sektor yang dapat menimbulkan masalah inflasi adalah sektor ekspor. Negara-negara berkembang, biasanya sektor ekspor mengalami perkembangan yang sangat lambat dan perkembangan tersebut tidak berlangsung terus, tetapi selalu mengalami keadaan naik turun (fluktuasi). Perkembangan ekspor seperti ini menyebabkan sektor tersebut tidak dapat menghasilkan valuta asing yang cukup untuk membiayai impor, yang biasanya berkembang lebih cepat daripada ekspor. Beberapa kebijaksanaan akan dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, yaitu dengan melaksanakan kebijakan substitusi impor, mempertinggi pajak impor untuk menghambat pemasukkan barang-barang impor, melarang sama sekali pengimporan beberapa jenis barang tertentu, dan mengawasi serta mengontrol jual beli valuta asing. Kalau kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut belum dapat mengatasi ketidakseimbangan dalam sektor luar negeri, sebagai langkah yang terakhir, kebijaksanaan menurunkan nilai mata uang (devaluasi) biasanya akan dilaksanakan. Berbagai tindakan tersebut akan menaikkan harga-harga barang luar negeri dan dapat menjadi sumber dari berlakunya inflasi.

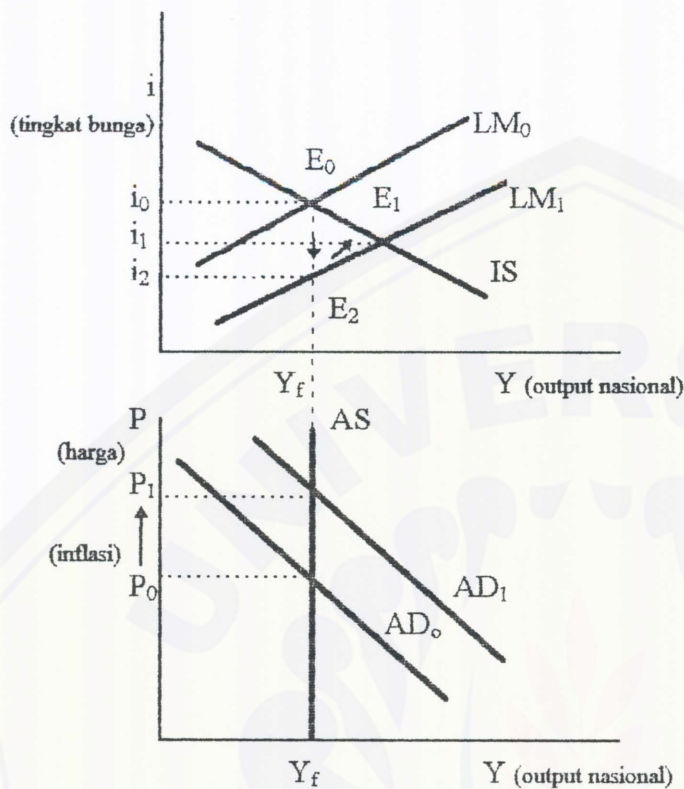
Perekonomian negara-negara berkembang pada umumnya merupakan ekonomi terbuka dan sektor luar negeri penting perannya dalam perekonomian. Inflasi akan menimbulkan akibat yang buruk pada pembangunan ekonomi, karena akan memperlambat perkembangan ekspor dan mempercepat pertumbuhan impor, yang selanjutnya akan memperburuk neraca pembayaran dan menaikkan nilai valuta asing. Inflasi pada akhirnya akan bertambah lebih cepat lagi.

### 3.4.1 Hubungan Inflasi dengan Jumlah Uang Beredar

Uang beredar atau dikenal sebagai penawaran uang merupakan besaran ekonomi pada umumnya, dan telah pula menjadi variabel kontrol ataupun variabel kebijakan, karena jumlah uang beredar erat kaitannya dengan perubahan harga ataupun laju inflasi.

Teori kuantitas (Boediono, 1982:161) mengatakan bahwa inflasi hanya dapat terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar, kejadian seperti kegagalan panen hanya akan meningkatkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.

Kenaikan jumlah uang sebagai akibat kebijakan moneter yang ekspansif dari Bank Sentral. Penambahan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva LM dari  $LM_0$  ke  $LM_1$ , dan sebagai akibat adanya kelebihan likuiditas tingkat bunga turun dari  $i_0$  ke  $i_2$ . Turunnya tingkat bunga akan meningkatkan investasi sehingga pendapatan meningkat, keseimbangan bergerak dari titik  $E_0$  ke  $E_1$ . Titik  $E_2$  bukan merupakan titik keseimbangan sebab tidak terletak pada kurva IS. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi masyarakat yaitu peningkatan permintaan agregat meningkat dari  $AD_0$  ke  $AD_1$ . Keadaan kurva AS vertikal pada output full employment dan dengan adanya kenaikan permintaan agregat akan mengakibatkan kenaikan harga (Nopirin, 1995:92). Keadaan tersebut akan mengakibatkan inflasi (gambar 2).



Gambar 2. Proses Terjadinya Inflasi Akibat Penambahan Jumlah Uang Beredar  
Sumber : Nopirin, 1995:92.

### 3.4.2 Hubungan Inflasi dengan Gross Domestic Bruto

AP Lerner dalam Gunawan (1991:2) mendefinisikan inflasi, adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Kelebihan permintaan akan barang-barang ini dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran untuk komoditi akhir dibandingkan dengan tingkat *output* yang dihasilkan.

Golongan strukturalis berpendapat bahwa inflasi di negara sedang berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur ekonominya. Inflasi bersumber dari ketidakmampuan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan produksi mereka dengan cepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perubahan permintaan. Sektor

yang paling tidak mampu untuk menambah produksi untuk memenuhi tambahan permintaan atas barang yang dihasilkan adalah sektor pertanian. Penduduk yang terus-menerus bertambah, dan perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke kota untuk bekerja di sektor industri akan meningkatkan permintaan atas bahan makanan. Rendahnya produktifitas dan beberapa faktor lainnya yang menghambat perkembangan kegiatan di sektor pertanian tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan yang bertambah tersebut. Harga bahan makanan yang meningkat akhirnya menimbulkan tuntutan kenaikan tingkat upah dan menyebabkan peningkatan ongkos produksi di sektor industri, yang pengaruhnya pada volume output (GDP riil).

Kaum moneteris berpendapat bahwa kendala-kendala tersebut tidak bersifat struktural dan otonom, tetapi timbul dari distorsi harga, kurs mata uang dan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi laju kenaikan harga. Sebagai contoh, bahwa inelastisitas struktural yang diperkirakan terjadi pada penawaran pangan dalam kenyataan timbul dari adanya pengendalian harga pangan yang terlalu sering dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen perkotaan dan menghindarkan dari tuntutan kenaikan upah yang terus bertambah besar. Campur tangan dalam operasi kekuatan pasar ini mempunyai pengaruh sebagai perangsang negatif terhadap para produsen pangan, tetapi hal yang demikian adalah distorsi yang ditimbulkan oleh pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan hal yang melekat dalam struktur pemilikan lahan. Harga-harga yang tinggi untuk beberapa barang perlu untuk mempengaruhi penawaran yang memadai, tetapi dalam konteks pengendalian menyeluruh terhadap jumlah uang yang beredar dan realokasi sumber daya melalui mekanisme pasar, harga-harga yang tinggi untuk barang-barang itu diimbangi oleh harga-harga rendah barang lain dan karenanya tidak timbul tekanan inflasi. Kaum moneteris selanjutnya mengemukakan bahwa pertumbuhan ekspor yang lamban disebabkan oleh kebijakan bukan oleh sebab-sebab struktural, yaitu berupa **kurs mata uang yang terlalu tinggi dan usaha pengembangan berorientasi ke dalam.**

Kaum moneteris dengan demikian mengetahui adanya kendala tetapi membalikkan hubungan kausalnya. Hambatan dalam perekonomian yang memperlamban pertumbuhan akan terkikis bila inflasi dikendalikan. Kebanyakan kaum moneteris mengakui prioritas sosial pembangunan, tetapi mengemukakan bahwa pertumbuhan yang stabil dan berkisambungan hanya dapat dicapai dalam suasana moneter yang stabil (Campos dalam Gemmell, 1992:256).

### 3.4.3 Hubungan Inflasi dengan Tingkat Harga Internasional

Golongan strukturalis berpendapat bahwa ketegaran utama yang dapat menimbulkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang timbul secara lamban dibanding dengan pertumbuhan dari sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan: (a) harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut tidak menguntungkan dibanding dengan barang impor yang harus dibayar atau dasar penukaran (*term of trade*) memburuk. Harga barang hasil alam yang merupakan komoditas ekspor negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat daripada harga barang industri yang merupakan impor bagi negara tersebut, (b) *supply* barang ekspor yang tidak elastis, kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang konsumsi dan barang modal, akibatnya negara yang berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu menerapkan strategi stabilisasi impor. Apabila proses substitusi impor meluas dan kenaikan biaya produksi juga makin meluas ke berbagai barang yang tadinya diimpor, maka makin banyak harga yang naik, dengan demikian inflasi terjadi (Boediono, 1994:162).

Ichiro Otani dalam Gunawan (1991:106) mengemukakan bahwa *imported inflation* terjadi karena adanya peningkatan harga barang ekspor dan impor di pasar dunia. Peningkatan harga ekspor akan meningkatkan indeks harga umum dan meningkatkan penerimaan ekspor (asumsi barang elastis) sehingga peningkatan penerimaan domestik yang menekan tingkat harga untuk naik. Naiknya penerimaan

ekspor (peningkatan saldo neraca berjalan) akan meningkatkan uang primer, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah uang beredar yang mendorong tingkat harga untuk naik.

Peningkatan harga impor akan mempengaruhi tingkat harga umum melalui tiga saluran, yaitu: (1) secara langsung meningkatkan indeks harga umum; (2) meningkatkan biaya input bahan baku dan barang modal, sehingga mendorong naiknya harga; (3) meningkatkan pengeluaran impor (saldo neraca berjalan) sehingga jumlah uang beredar primer turun, akibatnya terjadi kontraksi jumlah uang beredar dan sedikit mengekang jumlah uang beredar akibat peningkatan ekspor.

Turnovsky dalam Iswardono (1996:216) menganalisis inflasi yang diimpor dengan kerangka model konvensional yaitu model Keynesian-Philips untuk perekonomian jangka pendek, yaitu: (1) adanya peningkatan harga barang yang diproduksi oleh negara asing akan menurunkan harga relatif barang domestik, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan barang-barang tersebut; (2) terhadap neraca pembayaran secara langsung akan mempengaruhi jumlah uang beredar; (3) peningkatan harga menyebabkan produksi dalam negeri meningkatkan harga jualnya dan akhirnya meningkatkan harga barang impor yang akan menaikkan seluruh biaya hidup.

Kelompok Skandinavia dalam Iswardono (1996:217) menjelaskan transmisi inflasi dunia ke perekonomian domestik disebabkan semakin cepat peningkatan harga untuk barang-barang yang diperdagangkan (*tradeable goods*) akan memberikan peningkatan keuntungan bagi sektor tersebut, sehingga akan mendorong peningkatan upah nominal dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan upah disektor barang yang tidak diperdagangkan (*non tradeable goods*) sebagai akibat akhirnya terjadi peningkatan harga untuk barang-barang tersebut.

### 3.4.4 Hubungan Inflasi dengan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah

D. Dutton dalam Gunawan (1991:29) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dalam nilai riil cenderung tetap besarnya, apabila tingkat bunga naik nilai nominal pengeluaran meningkat secara proporsional dengan penerimaan pajak nominal yang cenderung tetap. Kecenderungan peningkatan pengeluaran tersebut menimbulkan defisit domestik anggaran pemerintah. Pengeluaran dipertahankan guna membiayai pembangunan, maka pemerintah menempuh cara defisit anggaran dengan cara menarik pinjaman dari perbankan, masyarakat, atau mencetak uang. Akibatnya akan timbul ekspansi moneter sehingga mendorong tingkat harga untuk naik, yang akhirnya akan menyebabkan inflasi.

Defisit domestik anggaran pemerintah yang diidentifikasi sebagai penyebab utama inflasi pada dasarnya mempunyai analisis moneter, karena defisit tersebut sebagai unsur yang ikut menentukan jumlah uang beredar lewat mekanisme proses penyediaan uang atau likuiditas dari uang primer (*base money*). Proses peningkatan harga itu sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran barang. Inflasi timbul karena sektor riil terdapat kelebihan permintaan barang terhadap penawarannya (*excess demand for goods*). Pada sektor moneter, inflasi timbul karena adanya kelebihan jumlah uang beredar atau penawaran uang (*excess supply of money*).

Donbush dan Fischer (1991:545) menyatakan ada dua interaksi antara defisit domestik anggaran pemerintah dan inflasi. Defisit domestik anggaran pemerintah yang besar dapat mendorong laju inflasi yang cepat, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit. Laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan defisit anggaran dengan mengurangi nilai riil dari penerimaan pajak.

Anwar Nasution dalam Gunawan (1991:57) menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat munculnya surplus anggaran luar negeri pemerintah (karena digunakan sistem anggaran berimbang, berarti terjadi defisit domestik anggaran pemerintah)



yang hampir seluruh devisanya di beli oleh Bank Indonesia, sehingga terjadi proses pembentukan uang (monetisasi). Monetisasi anggaran belanja luar negeri tersebut menjadi penyebab utama bertambahnya jumlah uang yang berakibat tekanan inflasi bagi perekonomian.

Defisit domestik anggaran pemerintah tidak selalu akan menyebabkan inflasi. Pada negara-negara berkembang masih terdapat kemungkinan untuk melaksanakan anggaran belanja pemerintah secara defisit tanpa menimbulkan inflasi, yaitu apabila salah satu atau gabungan dari beberapa syarat yang diuraikan tersebut dipenuhi (Sukirno, 1985:365), yaitu sebagai berikut :

1. defisit yang terjadi terutama dibiayai dari meminjam kepada masyarakat dan badan-badan keuangan. Kebijakan seperti itu perlu ditempuh apabila dirasakan bahwa dalam masyarakat terdapat tabungan yang tidak digunakan secara efektif dan dengan mudah dapat ditarik dari masyarakat apabila ditawarkan tingkat bunga yang menarik. Penggunaan tabungan masyarakat tersebut untuk membiayai defisit dalam anggaran belanja pemerintah merupakan suatu pemindahan daya beli dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah dan dengan demikian defisit tersebut tidak akan menimbulkan inflasi, yaitu di mana keseluruhan permintaan masyarakat melebihi kesanggupan untuk menghasilkan barang-barang;
2. secara umum dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tiga dasawarsa belakangan ini telah sanggup menyediakan tenaga ahli, tenaga berpendidikan, tenaga usahawan dan alat-alat modal yang lebih banyak. Hal tersebut menyebabkan mereka mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi pertambahan permintaan yang ditimbulkan oleh pertambahan daya beli yang diciptakan oleh defisit dalam anggaran pemerintah.

Apabila keadaan yang tersebut berlaku, pemerintah dapat melaksanakan anggaran belanja secara defisit dengan dibiayai dari meminjam kepada bank-bank komersial dan



Bank Sentral, ataupun dengan mencetak uang baru, tanpa menimbulkan inflasi, tetapi kebijaksanaan tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati.

### 3.5 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian

Dampak inflasi terhadap perekonomian (Nopirin,1985:30) dapat dibedakan menjadi :

#### 1. dampak inflasi terhadap pendapatan (*equity effects*)

Efek inflasi terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan, demikian juga orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kenyataannya menderita kerugian dengan adanya inflasi.

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase yang lebih besar daripada laju inflasi. Adanya serikat buruh kadangkala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dari persentase lebih besar daripada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan subsidi bagi orang lain.

#### 2. dampak inflasi terhadap efisiensi (*efficiency effects*)

Inflasi dapat pula menyebabkan pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan dapat terjadi melalui peningkatan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami peningkatan lebih besar daripada barang lain, yang kemudian mendorong peningkatan produksi barang tersebut. Peningkatan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah alokasi faktor produksi yang lebih efisien dalam

keadaan tidak ada inflasi. Namun, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

### 3. dampak inflasi terhadap output (*output effects*)

Kedua efek yakni efek pendapatan dan efek efisiensi dianalisis dengan menggunakan suatu anggapan bahwa *output* tetap. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui efek inflasi tersebut terhadap distribusi pendapatan dan efek dari jumlah output tertentu tersebut. Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya peningkatan produksi, karena dalam keadaan inflasi biasanya peningkatan harga barang mendahului peningkatan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong peningkatan produksi, namun apabila kenaikan inflasi ini cukup tinggi (hiperinflasi) dapat berakibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang.

Tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan *output* (Nopirin, 1995:32), karena inflasi dapat dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi dapat juga diikuti dengan penurunan *output*. Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda tergantung dengan kekuatan produksi. Apabila produksi barang ikut naik, maka peningkatan produksi ini sedikit banyak dapat menyeret laju inflasi. Sebaliknya, apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan *full employment* sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

### 3.6 Cara Mencegah Inflasi

Persamaan Irving Fisher  $MV=PT$ , dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa inflasi timbul karena  $MV$  naik lebih cepat daripada  $T$ , oleh karena itu untuk mencegah inflasi maka salah satu variabel ( $M$  dan  $V$ ) harus dikendalikan. Pengaturan variabel  $M$ ,  $V$  dan  $T$  tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal

atau kebijakan yang menyangkut kenaikan produksi (Nopirin, 1983:34), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M1). Salah satu komponen jumlah uang beredar adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke kas bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua, sifatnya lebih inflatoir daripada cara pertama, sebab cara pertama hanyalah pengalihan bentuk dari uang kas ke uang giral.

Bank Sentral dapat mengatur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Bank Sentral juga dapat menggunakan cara tingkat diskonto (*discount rate*) adalah tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral pada bank umum. Pinjaman ini biasanya berwujud tambahan cadangan di bank umum yang ada pada Bank Sentral, yang bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan, maka keinginan bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada Bank Sentral juga mengecil, akibatnya kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah.

Instrumen lain yang dapat digunakan untuk mencegah inflasi adalah politik pasar terbuka (jual-beli surat berharga), yaitu dengan cara menjual surat berharga yang dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berisi tentang pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan permintaan pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

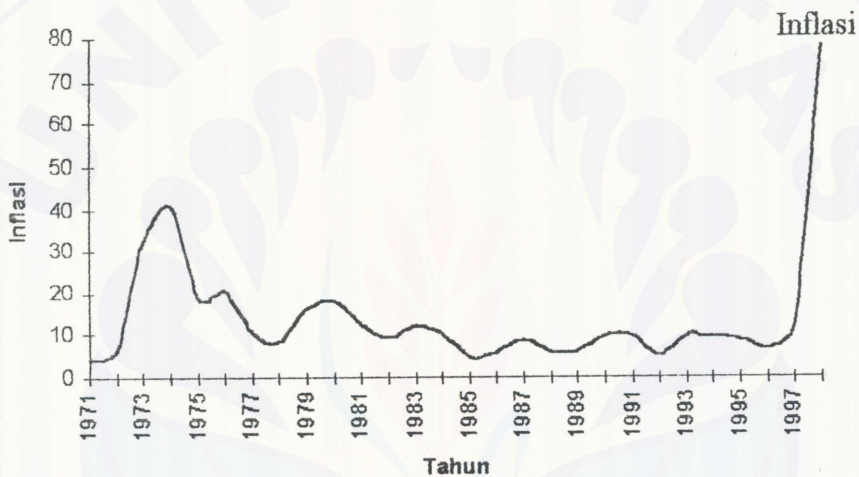
## 3. Kebijakan yang Berkaitan dengan *Output*

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, yang dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Pengaruh dari variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi inflasi selama periode tahun 1971-1998, dijabarkan penelitian ini dalam empat variabel, diantaranya adalah jumlah uang beredar, Gross Domestic Product, tingkat harga internasional, dan defisit domestik anggaran pemerintah. Pertumbuhan inflasi Indonesia yang diukur dengan IHK selama periode tahun 1971-1998 dapat dilihat pada grafik 1.

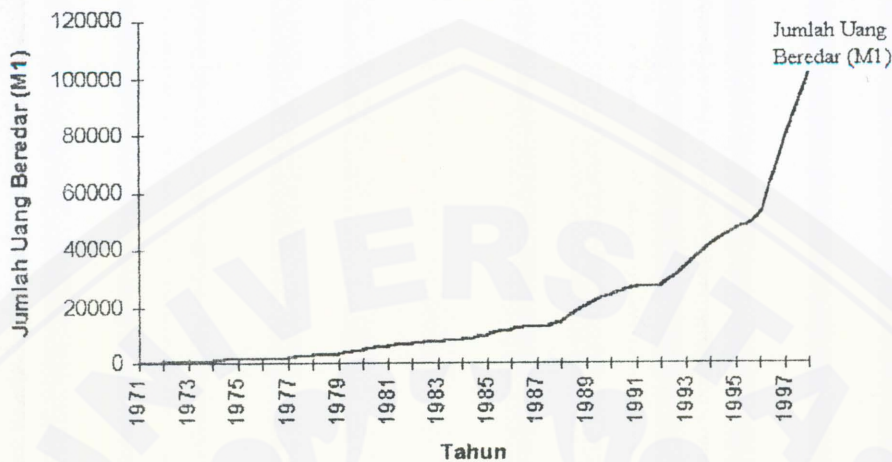


Grafik 1. Pertumbuhan Inflasi Indonesia Periode tahun 1971-1998  
 Sumber : Tabel 1.

Pertumbuhan Inflasi Indonesia sangat berfluktuasi, titik terendah terjadi pada tahun 1971 yang merupakan kesuksesan pemerintah dalam program stabilisasi dan rehabilitasi setelah gejala yang terjadi hiperinflasi tahun 1965. Titik tertinggi pada tahun 1998 akibat dari krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada khususnya dan Asean pada umumnya.

Variabel jumlah uang beredar seperti diterangkan dalam teori kuantitas sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Teori kuantitas mengatakan bahwa inflasi hanya dapat

terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang beredar. Tanpa ada peningkatan jumlah uang beredar, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Grafik 2 dapat dilihat pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) selama periode tahun 1971-1998.



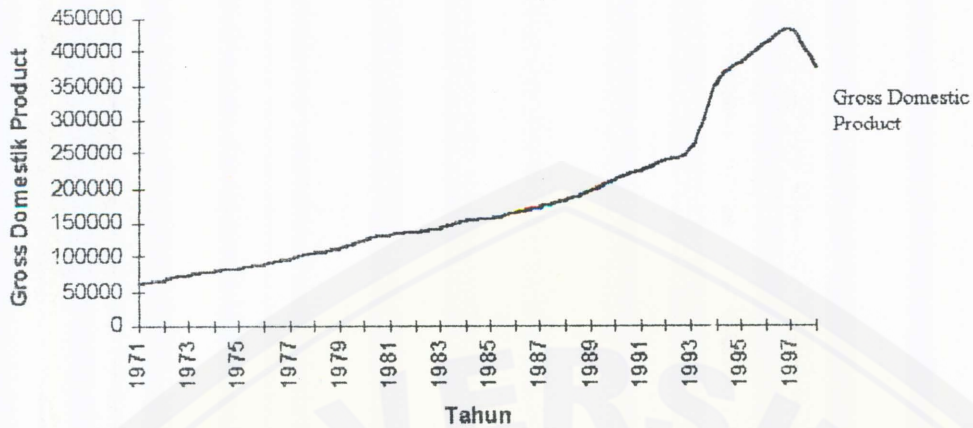
Grafik 2. Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (M1) Indonesia Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah)

Sumber : Tabel 2.

Selama periode penelitian tahun 1971-1998 jumlah uang beredar (M1) cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan uang khususnya M1 akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

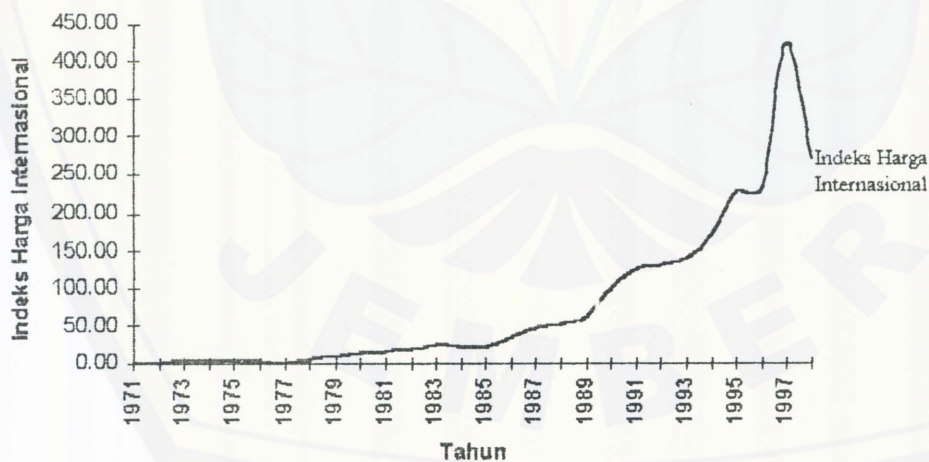
Inflasi dari sisi penawaran dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi kelebihan permintaan tanpa diikuti produksi yang mencukupi akan menimbulkan kenaikan harga yang selanjutnya akan terjadi inflasi.

Grafik 3 menggambarkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan Gross Domestic Product selama periode tahun 1971-1998. Pada kurun waktu 28 tahun pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 1996 dan menurun tahun 1998 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Kecenderungan pertumbuhan yang meningkat hingga awal tahun 1997 membawa Indonesia menjadi salah satu dari negara industri baru di Asia (*Newly Industrialized Countries* = NICS).



Grafik 3. Pertumbuhan Gross Domestic Product Riil Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1990 Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah)  
 Sumber : Tabel 3

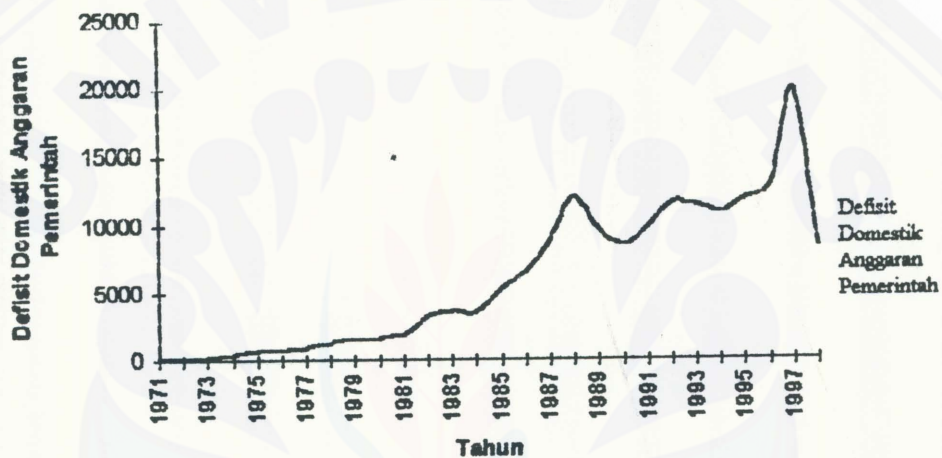
Perekonomian Indonesia yang terbuka memberikan banyak peluang bagi terjadinya inflasi yang diimpor. Pertumbuhan inflasi dengan Indikator menggunakan indeks harga internasional yang telah disesuaikan dengan nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah yang didasarkan pada indeks satuan nilai impor manufaktur (SITC 5-8) dapat dilihat pada grafik 4.



Grafik 4. Pertumbuhan Indeks Harga Internasional Indonesia Tahun 1971-1998  
 Sumber : Lampiran 2.

Fluktuasi indeks harga internasional sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai impor. Pertumbuhan impor terus meningkat selama periode tahun 1971-1997. Tahun 1997 dengan nilai impor sebesar 31.265 juta US\$ tercermin pada indeks harga internasional yang mencapai titik tertinggi sebesar 424,69 dan akhirnya tahun 1998 terjadi penurunan nilai impor menjadi 17.937 juta US\$ akibat krisis ekonomi dengan angka indeks harga internasional sebesar 271,91 .

Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari pos penerimaan dalam anggaran belanja pemerintah menyebabkan terjadinya defisit domestik anggaran pemerintah.



Grafik 5. Perkembangan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah Periode Tahun 1971-1998 (Miliar Rupiah)

Sumber : Lampiran 1.

Fluktuasi defisit domestik anggaran pemerintah Indonesia selama periode penelitian tahun 1971-1998 ditunjukkan pada grafik 5. Perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah mempunyai kecenderungan yang meningkat walaupun kadang-kadang terjadi penurunan. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia masih menggantungkan penerimaannya dari hutang luar negeri, dengan dianutnya anggaran defisit. Adanya defisit domestik anggaran pemerintah meningkatkan jumlah uang primer sehingga terjadi ekspansi uang beredar dan karena



meningkatkan jumlah uang primer sehingga terjadi ekspansi uang beredar dan karena tidak disertai dengan peningkatan permintaan barang yang seimbang, menyebabkan disequilibrium di pasar uang dan pasar barang yang menyebabkan inflasi.

#### 4.2. Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Gross Domestic Product, Tingkat Harga Internasional dan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia

##### 4.2.1 Pendekatan Kointegrasi

Pendekatan kointegrasi dinyatakan sebagai uji terhadap keseimbangan atau hubungan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi seperti yang dikehendaki dalam teori ekonomi, sebagai bagian dalam pembentukan dan estimasi model dinamis. Pendekatan ini dimulai dengan melakukan uji akar-akar unit, jika dalam uji ini data belum stasioner maka dilanjutkan uji derajat integrasi sampai data tersebut stasioner, kemudian setelah semua variabel stasioner dilakukan uji kointegrasi, sebagai berikut:

##### a. Uji Akar-Akar Unit

Uji akar-akar unit bertujuan untuk mengetahui apakah data *time series* yang digunakan dalam penelitian sudah stasioner atau belum. Hal tersebut disebabkan karena data *time series* yang belum stasioner akan menyebabkan  $R^2$  yang tinggi dan Durbin Watson statistik yang rendah atau akan menghasilkan regresi lancung (*Spurious Regresion*). Berdasarkan hasil perhitungan uji akar-akar unit diperoleh nilai DF dan ADF sebagaimana tertulis pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Akar-Akar Unit Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1971-1998

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
DINF	- 1,30	0,70
LDJUB	- 2,23	- 2,23
LDGDP	- 0,47	- 1,92
DIPINT	1,65	- 0,13
LDGDDB	- 3,24	- 0,45

Sumber: Lampiran 4.

Catatan: Nilai Tabel untuk:	DF	ADF
5%	- 2,99	- 3,61
10%	- 2, 63	- 3,24

Nilai DF dan ADF hitung menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai DF dan ADF tabel pada tingkat keyakinan 5% dan 10%, kecuali nilai DF variabel LogDGDDDB, dengan demikian semua variabel tersebut belum stasioner.

### b. Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi bertujuan untuk mengetahui pada order deferensi atau derajat berapa variabel yang diamati stasioner. Berdasarkan uji akar-akar unit diketahui bahwa semua variabel pengamatan masih belum stasioner, sehingga perlu dilakukan uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat keberapa data tersebut stasioner. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Derajat Integrasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1971-1998

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
DINF	0,83	1,15
LDJUB	4,55	4,40
LDGDP	3,52	2,82
DIPINT	3,19	4,18
LDGDDDB	4,34	4,08

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai DF dan ADF hitung lebih besar dari nilai DF dan ADF tabel pada derajat keyakinan 5% dan 10% kecuali untuk variabel DINF. Ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dianggap stasioner pada derajat satu atau I (1) artinya seluruh variabel stasioner setelah diturunkan sebanyak satu kali.

### c. Uji Regresi Kointegrasi

Seluruh variabel telah memiliki derajat integrasi yang sama maka dilakukan uji kointegrasi (rumus 5) untuk melihat apakah residualnya stasioner. Hasil estimasi regresi kointegrasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 pada lampiran 6, dapat disajikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{DINF} &= 114,76040 - 3,0934261 \text{ LogJUB} - 5,5212496 \text{ LogGDP} + 0,2627070 \text{ IPINT} \\ &\quad (2,3532) \quad (-1,0519) \quad (-1,0314) \quad (4,4597) \\ &\quad - 3,3411799 \text{ LogGDDB} \\ &\quad (-0,7623) \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,48$$

$$\text{CRDW} = 1,53$$

$$\text{DF} = -1,88$$

$$\text{ADF} = -1,88$$

Catatan : Nilai kritis CRDW = 0,386 ; DF = 3,37 ; ADF = 3,17.

Berdasarkan hasil estimasi uji kointegrasi, nilai CRDW hitung sebesar 1,53 lebih besar dari nilai CRDW tabel 0,386. Dengan derajat keyakinan 5% nilai DF (ADF) hitung nilainya kurang dari DF (ADF) tabel. Meskipun hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya uji CRDW yang lolos dari uji regresi kointegrasi, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan adanya hubungan jangka panjang antar variabel.

Penemuan lain yang dapat dicermati adalah timbulnya hasil yang kurang memuaskan dari estimasi regresi kointegrasi tersebut, yang disebabkan karena periode sampel pengamatan yang pendek. Hal tersebut selaras dengan pendapat Fry dalam Wardhono (1998:175) yang mengemukakan bahwa sampel pengamatan yang kecil atau sedikit akan memungkinkan suatu persamaan tidak lolos uji CRDW, uji DF dan ADF. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 28 tahun, tetapi masih dianggap pendek.

Hasil yang diperoleh dari uji regresi kointegrasi tersebut menunjukkan hal yang tidak memuaskan, karena tidak semua model lolos uji residualnya berdasarkan kriteria DF dan ADF. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengetahui kointegrasi data adalah dengan membentuk spesifikasi model dinamis yang berupa *Partial Adjustment Model* (PAM) dan *Error Correction Model* (ECM).

#### 4.2.2 Analisis Hasil Estimasi Model Penyesuaian Parsial (PAM)

Estimasi PAM sebagai model linier OLS klasik bertujuan untuk mengamati perilaku pertumbuhan inflasi di Indonesia dan variabel-variabel yang mempengaruhinya sesuai dengan teori ekonomi.

Berdasarkan persamaan (8) menghasilkan estimasi model PAM faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 jangka pendek pada lampiran 7 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DINF} = & 116,05857 + 3,0670870 \text{ LogJUB} - 6,9917211 \text{ LogGDP} + 0,2500768 \text{ IPINT} \\ & (2,8146) \quad (0,9445) \quad (-1,3911) \quad (5,0023) \\ & - 9,0939124 \text{ LogGDDB} + 0,8677904 \text{ BINF} \\ & (-2,1837) \quad (2,3946) \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,665$$

$$F_{\text{stat}} = 8,367$$

$$DW_{\text{stat}} = 2,254$$

Uji Diagnosis :

$$\text{Autokorelasi LM (3)} = 8,77$$

$$\text{Homokedastisitas ARCH (3)} = 12,34$$

Berdasarkan estimasi model PAM pada jangka pendek besarnya  $R^2$  dengan nilai 0,665, menunjukkan kenaikan pertumbuhan inflasi sebesar 66,5% disebabkan oleh variasi perubahan pertumbuhan LogJUB, LogGDP, IPINT dan LogGDDB, sedangkan sisanya sebesar 33,5% disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar model. Pengujian hipotesis terhadap parameter diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat keyakinan 5% ( $8,367 > 2,82$ ). Berdasarkan nilai tersebut dihasilkan bahwa variabel bebas (LogJUB, LogGDP, IPINT dan LogGDDB) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan variabel terikat (INF). Pengujian secara parsial terhadap model dengan menggunakan uji-t mengindikasikan bahwa variabel IPINT (5,0023), dan LogGDDB (2,1837) berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan inflasi pada derajat keyakinan 5% karena t hitung lebih besar dari t tabel (2,025).

Variabel LogJUB (0,9445) dan LogGDP (1,3911) karena  $t$  hitungnya lebih kecil dari  $t$  tabel (2,025), maka berpengaruh tidak nyata terhadap Inflasi.

Analisis hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dalam jangka pendek model PAM dilihat secara teoritis dengan hanya memperhatikan tanda dan besarnya koefisien dari variabel-variabel yang diamati dapat diketahui bahwa:

- a) koefisien konstanta bertanda positif sebesar 116,05857, dengan demikian dalam kondisi variabel-variabel lainnya konstan (tidak mengalami perubahan) maka rata-rata tingkat inflasi yang terjadi sebesar 166,05857 %;
- b) koefisien variabel jumlah uang beredar menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda positif, dengan demikian peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1 % akan meningkatkan inflasi sebesar 3,067087 %;
- c) koefisien variabel Gross Domestic Product menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda negatif, dengan demikian peningkatan Gross Domestic Product sebesar 1 % akan menurunkan inflasi sebesar 6,99172 %;
- d) koefisien variabel tingkat harga internasional menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda positif, dengan demikian peningkatan tingkat harga internasional sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sebesar 0,2500768 %;
- e) koefisien variabel defisit domestik anggaran pemerintah menunjukkan tanda negatif, dengan demikian peningkatan defisit domestik anggaran pemerintah sebesar 1% akan menurunkan inflasi sebesar 9,093912 %;

Hasil uji diagnosis yang terdiri dari uji autokorelasi dengan LM test, uji heterokedastisitas dengan ARCH test digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier diantara variabel bebas. Hasil  $\chi^2$  uji diagnosis tidak terjadi autokorelasi karena  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $8,77 < 11,3$ ) pada derajat keyakinan 1%. Tetapi terjadi heterokedastisitas ( $12,34 > 11,3$ ) pada derajat keyakinan 1% yang berarti keadaan varians dari variabel pengganggu tidak homogen (tidak konstan),

dalam hal ini penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten namun tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar.

Hubungan jangka panjang antara variabel bebas dengan variabel terikat model PAM dapat dilihat pada persamaan (9). Simpangan baku koefisien regresi jangka panjang dapat diperoleh dari akar pagkat dua varians berikut:

$$\text{Var}(\alpha_1) = \alpha_1^T v(\beta_5, \beta_1) \alpha_1$$

$$\alpha_1^T = (d\alpha_1/d\beta_1 \quad d\alpha_1/d\beta_5) \alpha_1 = [1/(1-\beta_5) \quad -\alpha_1/(1-\beta_5)]$$

$$\text{Var}(\alpha_2) = \alpha_2^T v(\beta_5, \beta_2) \alpha_2$$

$$\alpha_2^T = (d\alpha_2/d\beta_2 \quad d\alpha_2/d\beta_5) \alpha_2 = [1/(1-\beta_5) \quad -\alpha_2/(1-\beta_5)]$$

keterangan: variabel  $(\alpha_1)$ ,  $\text{Var}(\alpha_2)$  dan seterusnya merupakan penaksir varian  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  dan seterusnya, sedangkan  $V(\beta_5, \beta_1) \alpha_1$ ,  $V(\beta_5, \beta_2) \alpha_2$  dan seterusnya adalah matriks varian kovarians parameter yang sedang diamati. Hasil estimasi koefisien regresi jangka panjang model PAM faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 pada lampiran 7, dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{INF} = & 877,8376911 + 23,198670 \text{ LogJUB} - 52,8836113 \text{ LogGDP} \\ & (0,0032049) \quad (0,039334) \quad (-0,02667) \\ & + 1,891517711 \text{ IPINT} - 68,784055 \text{ LogGDDB} \\ & (0,70076) \quad (0,031893) \end{aligned}$$

Analisis model PAM jangka panjang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 diperoleh dengan membagi besarnya nilai koefisien variabel bebas dengan simpangan baku koefisien regresi jangka panjang. Hasil estimasi model PAM jangka panjang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara parsial dengan derajat keyakinan 5 % berpengaruh tidak nyata terhadap laju inflasi. Secara teori yang dilihat dari tanda koefisiennya sama dengan tanda koefisien jangka pendek.

#### 4.1.3 Analisis Hasil Estimasi Error Corection Model (ECM)

Estimasi model ECM merupakan salah satu alternatif dalam menguji kemungkinan kointegrasinya. Bila variabel ECT (*Error Correction Term*) signifikan berarti ECM valid (sahih) dan variabel yang diamati berko-integrasi atau residual hasil regresi stasioner.

Hasil estimasi model ECM menurut persamaan (10), faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 menghasilkan nilai t statistik yang signifikan atau lebih besar dari t tabel. Khususnya pada variabel ECT t hitungnya sebesar 3,007, mengindikasikan sahnya (valid) spesifikasi model dan menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel dengan derajat keyakinan 5% dan besarnya koefisien ECT adalah 0,0216. Spesifikasi model ECM dengan demikian secara statistik dikatakan lebih sahih dibandingkan dengan spesifikasi model PAM.

Hasil estimasi model ECM faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 jangka pendek pada lampiran 8, dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{DINF} = & 197,37402 + 0,1381756 \text{ DLogJUB} - 11,687411 \text{ DLogGDP} \\
 & (3,9600) \quad (0,0422) \quad (-3,6570) \\
 & + 0,00000495 \text{ DIPINT} - 16,987577 \text{ DLogGDDB} + 3,4384675 \text{ BLogJUB} \\
 & (1,0430) \quad (-2,1192) \quad (1,7305) \\
 & - 19,483576 \text{ BLogGDP} + 0,0163423 \text{ BIPINT} + 0,606762 \text{ BLogGDDB} \\
 & (-3,3553) \quad (0,1684) \quad (0,1581) \\
 & + 0,0216143 \text{ ECT} \\
 & (3,007)
 \end{aligned}$$

$$R^2 = 0,889$$

$$F_{\text{stat}} = 15,206$$

$$DW_{\text{stat}} = 2,361$$

**Uji Diagnosis :****Autokorelasi LM (3) = 6,851****Homokedastisitas ARCH (3) = 1,732**

Catatan : Nilai  $\chi^2$  (LM) :  $\alpha = 10\%$  ;  $5\%$  ;  $1\%$   
 (LM) (1) : 2,71 ; 3,84 ; 6,63  
 (LM) (2) : 4,61 ; 5,99 ; 9,21  
 (LM) (3) : 6,21 ; 7,81 ; 11,3

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dengan menggunakan pendekatan ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel-variabel bebas secara bersama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat sebesar 88,9% dan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi variabel lain di luar model. Variabel LogGDP (3,6570) dan LogGDDB (2,1192) pada tingkat keyakinan 5% secara parsial berpengaruh nyata terhadap variasi inflasi di Indonesia selama periode penelitian yang ditunjukkan dengan t hitung yang lebih besar daripada t tabel (2,052). Variabel lainnya seperti LogJUB (0,0422) dan IPINT (1,0430) hanya dapat menjelaskan variasi inflasi secara bersama, karena secara individu berpengaruh tidak nyata terhadap inflasi karena t hitung lebih kecil daripada t tabel (2,052).

Analisis hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dalam jangka pendek model ECM dilihat secara teoritis dengan hanya memperhatikan tanda dan besarnya koefisien dari variabel-variabel yang diamati dapat diketahui sebagai berikut:

- a) koefisien konstanta bertanda positif sebesar 197,37402 dengan demikian dalam kondisi variabel-variabel lainnya konstan (tidak mengalami perubahan) maka rata-rata tingkat inflasi yang terjadi sebesar 197,37402 %;
- b) koefisien variabel jumlah uang beredar menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda positif, dengan demikian peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sebesar 0,1381756 %;



- c) koefisien variabel Gross Domestic Product menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda negatif, dengan demikian peningkatan Gross Domestic Product sebesar 1% akan menurunkan inflasi sebesar 11,687411 %;
- d) koefisien variabel tingkat harga internasional menunjukkan tanda yang selaras dengan teori yaitu bertanda positif, dengan demikian peningkatan tingkat harga internasional sebesar 1 % akan meningkatkan inflasi sebesar 0,00000495 %;
- e) koefisien variabel defisit domestik anggaran pemerintah menunjukkan tanda negatif, dengan demikian peningkatan defisit domestik anggaran pemerintah sebesar 1 % akan menurunkan inflasi sebesar 16,987577%;

Selanjutnya dilakukan uji diagnosis, yang pertama adalah uji multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi bila nilai  $R^2$  tinggi, nilai t hitung semua variabel bebas berpengaruh tidak nyata dan nilai F hitung lebih tinggi daripada F tabel. Pengujian dilakukan berdasarkan uji Klein yaitu dengan cara melakukan regresi sederhana antara dua variabel bebas dengan menjadikan salah satu sebagai variabel terikat, kemudian nilai  $r^2$  dari masing-masing regresi tersebut dibandingkan dengan nilai  $R^2$  hasil regresi berganda yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila nilai  $r^2$  yang telah diperoleh tersebut lebih besar dari nilai  $R^2$  hasil estimasi ECM, maka terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel yang mempengaruhi atau sebaliknya.

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai  $r^2$  seluruhnya lebih kecil daripada nilai  $R^2$  hasil estimasi ECM yang besarnya adalah 0,889511.

Tabel 8. Nilai  $r^2$  Hasil Regresi Antar Variabel Bebas

Variabel Terikat	Variabel bebas	Nilai $r^2$
BLJUB	BLGDP	0,569302
	BIPINT	0,625507
	BLGDDB	0,838073
BLGDP	BLJUB	0,569302
	BLIPINT	0,534981
	BLGDDB	0,709903
BLIPINT	BLJUB	0,625507
	BLGDP	0,534981
	BLGDDB	0,648315
BLGDDB	BLJUB	0,838073
	BLGDP	0,709903
	BLGIPINT	0,648315

Sumber: lampiran 9.

Hasil estimasi ECM uji diagnosis pada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 dapat diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $6,851 < 7,81$ ), dan tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $1,732 < 7,81$ ), pada derajat keyakinan 5%.

Hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat model ECM berdasarkan persamaan (11). Simpangan baku koefisien regresi jangka panjang dapat diperoleh dari akar pangkat dua varians berikut ini:

$$\text{Var}(\gamma_0) = \gamma_0^T V(\lambda_0, \lambda_0) \gamma_0$$

$$\gamma_0 = (d\gamma_0/d\lambda_0 \quad d\gamma_0/d\lambda_0) = [1/\lambda_0 \quad \gamma_0/\lambda_0]$$

$$\text{Var}(\gamma_1) = \gamma_1^T V(\lambda_1, \lambda_1) \gamma_1$$

$$\gamma_1 = (d\gamma_1/d\lambda_1 \quad d\gamma_1/d\lambda_1) = [1/\lambda_1 \quad -(\gamma_1 - 1)/\lambda_1]$$

$$\text{Var}(\gamma_2) = \gamma_2^T V(\lambda_2, \lambda_2) \gamma_2$$

$$\gamma_2 = (d\gamma_2/d\lambda_2 \quad d\gamma_2/d\lambda_2) = [1/\lambda_2 \quad -(\gamma_2 - 1)/\lambda_2]$$

Keterangan:  $\text{Var}(\gamma_0)$ ,  $\text{Var}(\gamma_1)$ ,  $\text{Var}(\gamma_2)$  merupakan penaksir varians  $\gamma_0$ ,  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  sedangkan  $V(\lambda_0, \lambda_0) \gamma_0$ ,  $V(\lambda_1, \lambda_1) \gamma_1$ ,  $V(\lambda_2, \lambda_2) \gamma_2$  adalah matrik varians-covarians

parameter yang sedang diamati. Hasil estimasi koefisien regresi jangka panjang model ECM faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998 pada lampiran 8, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{INF} = & 9131,6406 + 160,082994 \text{ LogJUB} - 900,420633 \text{ LogGDP} \\ & (0,000433) \quad (0,01095) \quad (-0,003719) \\ & + 0,24391259 \text{ IPINT} + 29,027228 \text{ LogGDDB} \\ & (0,07856) \quad (0,00583) \end{aligned}$$

Analisis model ECM dalam jangka panjang menunjukkan bahwa tanda koefisien variasi sama dengan jangka pendek kecuali variabel LogGDDB yang dalam jangka panjang akan meningkatkan inflasi. Secara parsial dengan derajat keyakinan 5% semua variabel berpengaruh tidak nyata terhadap laju inflasi.

#### 4.3 Pembahasan

Beberapa hal penting yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kointegrasi, semua variabel pengamatan stasioner pada I (1), kecuali untuk variabel BINF pada I (2). Berdasarkan pendekatan regresi kointegrasi diketahui model tersebut tidak semuanya lolos dari uji regresi kointegrasi, kecuali untuk uji CRDW, ini menunjukkan bahwa residualnya stasioner meskipun pada tingkat yang rendah. Salah satu sebab utama adalah kecilnya observasi. Menurut Fry dalam Wardhono (1998:175) adanya regresi kointegrasi yang tidak lolos dari uji CRDW, uji DF dan uji ADF lebih disebabkan karena sampel pengamatan yang terlalu pendek. Apabila jumlah observasi lebih banyak maka kemungkinan variabel pengamatan memiliki hubungan jangka panjang sebagaimana yang dikehendaki dalam teori.

Berdasarkan hasil estimasi model PAM dan ECM jangka pendek dihasilkan dari model PAM bahwa variabel yang secara statistik berpengaruh nyata terhadap laju inflasi di Indonesia adalah IPINT (0,2500768), LogGDDB (-9,0939124), sedangkan variabel LogJUB (3,0670870) dan LogGDP (-6,9917211) berpengaruh tidak nyata

Nasution (Gunawan, 1991:55) yang menerangkan proses terjadinya inflasi di Indonesia pada tahun 1970-an sebagai akibat munculnya surplus anggaran luar negeri pemerintah, yang hampir seluruh devisanya dibeli oleh Bank Indonesia sehingga terjadi proses monetisasi. Monetisasi anggaran belanja luar negeri pemerintah tersebut menjadi penyebab utama cepatnya pertambahan jumlah uang beredar (rata-rata 30%-40%) sehingga menyebabkan tekanan inflasi bagi perekonomian.

Volume produksi *output* riil dalam negeri (GDP) yang cukup memenuhi tidak akan menyebabkan kelebihan permintaan dalam negeri yang dapat memicu kenaikan harga sehingga terjadi inflasi. Sektor produksi yang sangat rentan terhadap kenaikan harga adalah sektor produksi bahan pangan (pertanian) dan bahan bakar. Golongan strukturalis mengemukakan, bahwa salah satu hambatan struktural yang ada di negara berkembang adalah inelastisnya penawaran bahan makanan, terutama beras untuk Indonesia. Ketergantungan perekonomian Indonesia yang demikian besar terhadap sektor pertanian seperti yang dicerminkan oleh peran nilai tambahnya yang relatif besar serta daya serap tenaga kerja tinggi. Tingkat produktivitas sektor pertanian yang rendah, serta ditambah lagi beban penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan tingkat harga bahan makanan meningkat cukup cepat. Juga terjadinya perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor non - pertanian (industri dan jasa) di daerah perkotaan, menambah berat beban permintaan akan bahan makanan (beras), sementara penawarannya pun tak dapat berkembang cepat mengikuti permintaannya.

Pentingnya minyak dan gas bumi dalam pembiayaan pembangunan Indonesia tercermin dalam besarnya PPs minyak terhadap total penerimaan pemerintah (rata-rata di atas 40%). Komoditi minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasil devisa terbesar sejak *boom* minyak tahun 1973/1974. Mengingat sangat pekanya perekonomian Indonesia terhadap fluktuasi permintaan dan produksi minyak dan gas bumi, terutama pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah dan devisa negara, tentunya juga akan mempengaruhi perkembangan tingkat harga umum. Terlebih lagi mengingat adanya gejala *Dutch Disease* yang terbawa bersama timbulnya *boom*

minyak ke dalam perekonomian Indonesia. Pendapat tersebut merupakan hasil analisis dari Anwar Nasution pada tahun 1970-an (Gunawan, 1991:114), yang mempunyai gejala sebagai berikut:

1. monetisasi penerimaan devisa negara menyebabkan jauh lebih besarnya inflasi Indonesia dibandingkan dengan laju inflasi dunia atau mitra dagang;
2. bagian penerimaan negara dari minyak dan gas bumi yang dipungut dari kontraktor asing meningkat sehingga membuka kesempatan pemerintah untuk meningkatkan peran secara langsung dalam perekonomian;
3. ada distorsi harga akibat campur tangan langsung atau tidak langsung pemerintah, serta adanya subsidi guna mengendalikan inflasi;
4. meningkatnya arus urbanisasi akibat adanya kesenjangan ekonomi dan kualitas hidup antara kota-kota besar dengan daerah pedesaan.

Variabel tingkat harga internasional yang telah disesuaikan dengan rupiah berpengaruh tidak nyata (kecil) terhadap peningkatan inflasi dalam jangka pendek. Hal tersebut disebabkan peningkatan harga impor yang pesat dicerminkan dengan meningkatnya pengeluaran impor (saldo neraca berjalan) sehingga terjadi ekspansi jumlah uang beredar. Akibat selanjutnya terjadi kontraksi jumlah uang beredar dan sedikit mengekang jumlah uang beredar karena peningkatan ekspor. Peningkatan harga barang yang diproduksi oleh negara asing akan menurunkan harga relatif barang domestik, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan barang-barang dalam negeri, yang akan berpengaruh pada neraca pembayaran dan jumlah uang beredar. Hasil tersebut belum sejalan dengan hasil yang diperoleh J.Sudradjad Djiwandono (Gunawan, 1991:57), bahwa tingkat harga impor paling besar pengaruhnya terhadap laju inflasi domestik Indonesia selama periode 1968-1978.

Peningkatan harga di luar negeri menyebabkan produsen dalam negeri meningkatkan harga jual barang impor yang selanjutnya menaikkan seluruh biaya hidup (inflasi). Upaya pemerintah untuk mengurangi inflasi yang diimpor adalah dengan kebijakan perdagangan internasional yang disertai dengan kebijakan sterilisasi

penerimaan luar negeri, berupa pengeluaran impor barang-barang penting untuk pembangunan atau digunakan untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Peningkatan penerimaan ekspor juga ditingkatkan untuk mengimbangi laju impor dengan meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui peningkatan efisiensi produksi komoditi ekspor. Selain itu adanya kebijakan nilai tukar valuta asing diarahkan pada penetapan nilai tukar realistis yang digunakan untuk penyesuaian jangka pendek secara kontinyu akan mengurangi efek inflasi dibandingkan dengan melalui kebijakan devaluasi.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan pendekatan kointegrasi, variabel penelitian stasioner pada derajat pertama atau I (1). Uji kointegrasi menghasilkan kesimpulan bahwa tidak semua variabel lolos uji residual berdasarkan kriteria *Dicky Fuller* (DF) dan *Augmented Dicky Fuller* (ADF) karena hasilnya lebih kecil daripada DF dan ADF tabel ( $1,88 < 3,37$ ) dan ( $1,88 < 3,17$ ) tetapi lolos dalam kriteria *Cointegrating Regresion Durbin Watson* (CRDW) karena hasilnya lebih besar daripada CRDW tabel ( $1,53 > 0,386$ ) pada derajat keyakinan 5%.
2. berdasarkan estimasi PAM, secara uji t variabel IPINT dan LogGDDB berpengaruh nyata terhadap inflasi di Indonesia selama periode tahun 1971-1998 dengan besar koefisien masing-masing adalah 0,2500768 dan - 9,0939124 pada derajat keyakinan 5%. Variabel LogJUB dan LogGDP pada derajat keyakinan 5% berpengaruh tidak nyata terhadap inflasi dengan masing-masing koefisien sebesar 3,0670870 dan -6,9917211. Berdasarkan estimasi jangka pendek pengaruh variasi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,665, ini berarti kenaikan inflasi sebesar 66,5% disebabkan oleh variasi variabel bebas dan sisanya 33,5% disebabkan oleh faktor di luar model. Berdasarkan uji F disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh nyata, ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel ( $8,367 > 2,68$ ) pada tingkat keyakinan 5%. Hasil  $\chi^2$  uji diagnosis tidak terjadi autokorelasi karena  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $8,77 < 11,3$ ) pada derajat keyakinan 1%.

Tetapi terjadi heterokedastisitas ( $12,34 > 11,3$ ) pada derajat keyakinan 1% yang berarti keadaan varians dari variabel pengganggu tidak homogen (tidak konstan), dalam hal ini penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten namun tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Hasil estimasi PAM jangka panjang menghasilkan bahwa semua variabel dalam uji t, berpengaruh tidak nyata terhadap variasi inflasi di Indonesia dan tanda koefisien tidak terjadi perubahan. Berdasarkan hasil estimasi PAM yang tidak lolos uji dignosis, maka model ini dianggap kurang valid (sahih).

- berdasarkan estimasi ECM, secara uji t variabel LogGDP dan LogGDDB dengan koefisien -11,687411 dan -16,987577 pada derajat keyakinan 5% berpengaruh nyata terhadap inflasi di Indonesia periode tahun 1971-1998. Variabel LogJUB dan IPINT berpengaruh tidak nyata terhadap inflasi dengan masing-masing koefisien sebesar 0,1381756 dan 0,00000495. Berdasarkan estimasi jangka pendek pengaruh variasi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,889, ini berarti kenaikan inflasi sebesar 88,9% disebabkan oleh variasi variabel bebas dan sisanya 11,1% disebabkan oleh faktor di luar model. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap inflasi, ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel pada tingkat keyakinan 5% ( $8,367 > 2,68$ ). Uji diagnosis diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $6,851 < 7,81$ ), dan tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai  $\chi^2$  hitung lebih kecil daripada  $\chi^2$  tabel ( $1,732 < 7,81$ ), pada derajat keyakinan 5%. Antara variabel-variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas yang ditunjukkan dengan semua hasil  $r^2$  regresi sederhana lebih kecil daripada  $R^2$  hasil regresi berganda. Hasil estimasi ECM jangka panjang menghasilkan bahwa semua variabel dalam uji t berpengaruh tidak nyata terhadap variasi inflasi di Indonesia. Tanda koefisien mengalami perubahan pada variabel LogGDDB yang dalam jangka panjang akan



meningkatkan inflasi. Berdasarkan hasil estimasi ECM yang lolos dari uji diagnosis, maka model ini dianggap lebih valid (sahih).

## 5.2 Saran

1. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah harus diupayakan dengan menitikberatkan pada dampak jumlah uang beredar, tingkat harga internasional dan defisit domestik anggaran pemerintah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan inflasi di Indonesia.
2. Kondisi perekonomian Indonesia akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka tidak menutup peluang bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak sesuai lagi, untuk itu perlu kiranya dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai inflasi dilakukan penyempurnaan dalam bentuk fungsional model, bentuk variabel-variabel yang diikutsertakan dalam model dan periode penelitian yang diperpanjang. Penambahan variabel yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi perekonomian selama periode penelitian diharapkan dapat memperbaiki model.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agmon, Tamir dan Renvan Horesh. 1994. *Inflasi, Desinflasi, dan Keputusan Keuangan*. Terjemahan, Burhan Wirasubrata. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Alkadri. "Pertumbuhan Output Indonesia". dalam *Jurnal Studi Indonesia*. Tangerang: Pusat Studi Indonesia Lembaga Penelitian Universitas Terbuka
- Bank Indonesia . 1999. *Laporan Mingguan* . Jakarta: Bank Indonesia
- Biro Pusat Statistik. beberapa penerbitan (1973-1999). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE - UGM
- . 1994. *Ekonomi Moneter II*. Yogyakarta: BPFE - UGM
- . 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE - UGM
- Dajan, Anto. 1987. *Statistik I*. Jakarta:LP3ES
- . 1996. *Statistik II*. Jakarta:LP3ES
- Dernburg, Thomas F. 1982. *Makro Ekonomi : Konsep, Teori dan Kebijaksanaan*. Terjemahan P. Sitohang. Jakarta : Erlangga
- Djiwandono, Soedradjad. 1997. "Perkembangan Kebijakan Moneter, Perbankan dan Neraca pembayaran". dalam *Perekonomian Indonesia: Memasuki Milenium Ketiga*. London, Inggris: Internasional Quality Publications
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Ficher. 1991. *Makro Ekonomi*. Terjemahan Mulyadi. Jakarta: Erlangga
- Fleming, John. 1985. *Inflasi*. Terjemahan Paul Rosyadi. Jakarta: Aksara Persada
- Gujarati, Damodor. 1991. *Ekonometri*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, A. Hernawan. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama

- Hartati, Enny Sri. 1999. "Indikator Ekonomi dan Bisnis Kuartal Ketiga 1999." dalam *INDEF*. Jakarta : INDEF
- IMF. 1998. *The International Financial Statistics*. Jakarta: IMF
- Insukindro. 1990. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- \_\_\_\_\_. 1991. "Pendekatan Kointegrasi dalam Analisis Ekonomi: Studi Kasus Permintaan Deposito dalam Valuta Asing di Indonesia". dalam *Jurnal Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Iswardono, Sp. 1996. *Uang dan Bank*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Komerschen, David R. 1984. *Money and Banking* . 8th Edition. Cincinnati, Ohio : South - Western Publishing Co.
- Manulang, 1983. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, M. 1988. *Metode Penulisan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nopirin. 1985. *Ekonomi Moneter II*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- \_\_\_\_\_. 1994. *Teori Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE- UGM.
- Partadiredja, Ace. 1984. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE - UGM
- Prasetiantono, Tony. A. 1997. *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prawiro, Warjiyo dan Doddy Zulverdy. 1998. " Penggunaan Suku Bunga sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia". dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia
- Rahardja, Pratama. 1990. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sinungan, Muchdarsyah. 1991. *Uang dan Bank*.. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sugiyanto, Catur. 1995. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta : BPFE
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: FE-UI
- Sulistyo, M.1982. *Ekonometrik*. Yogyakarta : BPFE.

- Suparmoko dan Irawan. 1990. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: FE-UI
- Supranto, J. 1983. *Ekonometrika*. Jakarta: FE- UI
- . 1987. *Statistik II*. Jakarta: FE- UI
- Suroso. 1997. *Perekonomian Indonesia* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama.
- Usman, Marzuki. 1997. “Kebijakan Fiskal”. dalam *Perekonomian Indonesia: Memasuki Milenium Ketiga*. London, Inggris: Internasional Quality Publications
- Venieris, Y.P and F.D. Sebold. 1987. *Macro Economic Models and Policy*. New York: John Wiley and Sons Inc
- Wahono, Puji. 1997. “Arah Kebijaksanaan dan Fundamental Ekonomi”. dalam *INDEF*. Jakarta : INDEF
- Wardhono, Aditya. 1998. *Pendekatan Backward dan Forward Working Model pada Penentuan Tingkat Bunga Nominal di Indonesia dan Filipina, 1985. I - 1996.IV*. tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Tesis S2 UGM.
- Widodo HG, Suseno T . 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius
- Wijaya, F dan Hadiwiyono, S. 1984. *Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan : Kumpulan Bacaan Terpilih*. Yogyakarta: BPFE UGM.

**Lampiran 1. Perhitungan Indeks Harga Internasional**

Guna mendapatkan nilai indeks harga internasional yang disesuaikan dengan kurs rupiah terhadap dollar Amerika dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai impor maufaktur (SITC 5-8) diubah menjadi indeks harga internasional berdasarkan indeks satuan nilai impor maufaktur (SITC 5-8) dengan metode indeks Laspayres, yaitu sebagai berikut;

$$IL = \frac{\sum P_n \cdot Q_o}{\sum P_o \cdot Q_o} \times 100$$

Keterangan : IL = Indeks Laspayres

P<sub>n</sub> = Nilai impor tahun tertentu

P<sub>o</sub> = Nilai impor tahun dasar

Q<sub>o</sub> = Volume impor tahun dasar

2. Untuk memperoleh indeks harga internasional yang telah disesuaikan dengan kurs rupiah terhadap dollar Amerika, maka indeks harga internasional dikalikan dengan indeks perkembangan kurs rupiah terhadap dollar Amerika.

Lanjutan lampiran 1

## Perkembangan Indeks Harga Internasional Periode Tahun 1971 - 1998

Tahun	Nilai Impor (P) (US \$)	$IL = \frac{\Sigma P_n \cdot Q_o}{\Sigma P_o \cdot Q_o} \times 100$		Kurs (Rp/\$)	IXr (Indeks Exchange Rate)	Indeks Harga Internasional (Rp)
1971	502	0.029	2.940	450.6	0.166	0.488
1972	761	0.045	4.458	450.6	0.166	0.740
1973	1729	0.101	10.128	500.6	0.185	1.874
1974	2841	0.166	16.641	508.1	0.187	3.112
1975	2969	0.174	17.391	485.8	0.179	3.113
1976	3673	0.215	21.515	482.2	0.178	3.830
1977	323	0.019	1.892	504.1	0.186	0.352
1978	3669	0.215	21.491	814.1	0.301	6.469
1979	4202	0.246	24.613	826	0.305	7.507
1980	7834	0.459	45.888	799.4	0.295	13.537
1981	9216	0.540	53.983	749.6	0.277	14.953
1982	11172	0.654	65.440	749.6	0.277	18.127
1983	10305	0.604	60.362	1040.7	0.384	23.179
1984	9438	0.553	55.284	1052.7	0.389	21.505
1985	7584	0.444	44.424	1235.7	0.456	20.257
1986	8084	0.474	47.352	2007.3	0.742	35.135
1987	9399	0.551	55.055	2340.8	0.865	47.623
1988	10150	0.595	59.454	2329.4	0.861	51.190
1989	12372	0.725	72.470	2361.5	0.873	63.266
1990	17072	1.000	100.000	2704.5	1	100.000
1991	20181	1.182	118.211	2849.4	1.053	124.476
1992	21240	1.244	124.414	2835.3	1.048	130.386
1993	22177	1.299	129.903	2898.2	1.071	139.126
1994	24671	1.445	144.511	3211.7	1.187	171.535
1995	30636	1.795	179.452	3430.8	1.268	227.545
1996	31323	1.835	183.476	3426.7	1.267	232.464
1997	31265	1.831	183.136	6274	2.319	424.693
1998	17937	1.051	105.067	7000	2.588	271.913

Sumber: BPS, beberapa penerbitan dan data diolah.

## Lampiran 2. Perhitungan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah Periode Tahun 1971 - 1998

Guna mendapatkan besarnya defisit domestik anggaran pemerintah dalam tahun kalender dari APBN, perlu dilakukan beberapa tahap pengolahan yaitu:

1. Perhitungan defisit domestik anggaran pemerintah berdasarkan pada *overall deficit*, yaitu pengeluaran total dikurangi penerimaan dalam negeri. Secara ringkas perhitungan defisit domestik anggaran pemerintah adalah sebagai berikut:

Penerimaan dalam negeri = Penerimaan minyak bumi dan gas + Pajak,

Pengeluaran total = Pengeluaran rutin + Pengeluaran pembangunan,

Defisit domestik = Pengeluaran total - Penerimaan dalam negeri.

2. Data defisit domestik anggaran pemerintah dalam tahun anggaran perlu diubah dahulu menjadi data triwulan dengan metode interpolasi (Iswardono, 1996:55) yaitu sebagai berikut:

$$I : 1/4 \{ Y_t - 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$II : 1/4 \{ Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$III : 1/4 \{ Y_t + 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

$$IV : 1/4 \{ Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \}$$

Keterangan:  $Y_t$  = Nilai tahun sekarang;

$Y_{t-1}$  = Nilai tahun sebelumnya.

3. Data tahun kalender defisit domestik anggaran pemerintah diperoleh dengan menjumlahkan nilai triwulan IV tahun sebelumnya di tambah nilai triwulan I, II, III tahun sekarang.

## Lanjutan lampiran 2

## Perkiraan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah

Tahun 1970/71 - 1998/1999

(Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Pengeluaran Total	Defisit Domestik Anggaran Pemerintah
1970/71	344.60	457.80	113.20
1971/72	428.00	545.00	117.00
1972/73	590.60	736.30	145.70
1973/74	967.70	1164.20	196.50
1974/75	1753.70	1977.90	224.20
1975/76	2241.90	2730.30	488.40
1976/77	2906.00	3684.30	778.30
1977/78	3535.40	4305.70	770.30
1978/79	4266.10	5300.30	1034.20
1979/80	6696.80	8076.00	1379.20
1980/81	10227.00	11716.10	1489.10
1981/82	12212.60	13910.70	1698.10
1982/83	12418.30	14355.90	1937.60
1983/84	14432.70	18310.90	3878.20
1984/85	15905.50	19381.50	3476.00
1985/86	19252.50	22824.60	3572.10
1986/87	17385.80	23464.90	6079.10
1987/88	20803.10	27259.20	6456.10
1988/89	22999.00	33026.20	10027.20
1989/90	28940.40	41783.90	12843.50
1990/91	39546.20	47451.20	7905.00
1991/92	41585.50	50492.80	8907.30
1992/93	47454.60	57603.90	10149.30
1993/94	52280.50	64460.90	12180.40
1994/95	61370.30	72342.10	10971.80
1995/96	71558.20	82353.00	10794.80
1996/97	78203.00	90618.80	12415.80
1997/98	88061.10	101087.40	13026.30
1998/99	108184.40	131545.70	23361.30

Sumber : Tabel 5



## Lanjutan lampiran 2

**Perkembangan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah Tahun 1971 - 1998  
(Kwartalan dan Tahunan)**

Tahun	Kwartal I	Kwartal II	Kwartal III	Kwartal IV	Defisit Tahunan
1970	28.89	29.13	29.37	29.61	-
1971	33.73	35.53	37.32	39.12	136.19
1972	44.36	47.54	50.71	53.89	181.73
1973	53.45	55.18	56.92	58.65	219.44
1974	97.33	113.84	130.36	146.87	400.18
1975	167.4	185.52	203.63	221.75	703.42
1976	193.33	192.83	192.33	191.83	800.24
1977	233.81	250.3	266.8	283.29	942.74
1978	312.46	334.02	355.58	377.14	1285.35
1979	361.97	368.84	375.71	382.58	1483.66
1980	404.93	417.99	431.06	444.12	1636.56
1981	461.95	476.92	491.88	506.85	1874.87
1982	787.62	908.91	1030.19	1151.48	3233.57
1983	906.71	881.57	856.43	831.29	3796.19
1984	884.02	890.02	896.03	902.03	3501.36
1985	1284.74	1441.43	1598.12	1754.81	5226.32
1986	1578.68	1602.24	1625.81	1649.37	6561.54
1987	2172.01	2395.2	2618.4	2841.59	8834.98
1988	2946.85	3122.87	3298.88	3474.9	12210.19
1989	2439.23	2130.58	1821.92	1513.27	9866.63
1990	2132.86	2195.5	2258.15	2320.79	8099.78
1991	2420.89	2498.51	2576.14	2653.76	9816.33
1992	2854.68	2981.63	3108.57	3235.52	11598.64
1993	2856.26	2780.72	2705.18	2629.64	11577.68
1994	2715.29	2704.23	2693.17	2682.11	10742.33
1995	2951.98	3053.29	3154.61	3255.92	11841.99
1996	3199.34	3237.5	3275.65	3313.81	12968.41
1997	4871.42	5517.36	6163.29	6809.23	19865.88
1998	2190.12	730.04	-730.04	-2190.12	8999.35

Sumber: diolah dari tabel 5.

Lampiran 3. Data Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1971-1998

obs	INF	LJUB	LGDP	IPINT	LCDDB
1971	4.390000	5.746203	11.02414	0.488000	4.912287
1972	6.310000	6.154858	11.11419	0.740000	5.192568
1973	31.68000	6.505784	8.910181	1.784000	5.376528
1974	40.60000	4.543295	11.29491	3.112000	5.987582
1975	18.71000	4.828314	11.34348	3.113000	6.532189
1976	20.27000	5.075174	11.41064	3.830000	6.661995
1977	10.86000	7.603898	11.49407	0.352000	6.849310
1978	8.100000	7.819234	11.56955	6.469000	7.145866
1979	16.25000	8.125335	11.63023	7.507000	7.287629
1980	18.01000	8.517393	11.72445	13.53700	7.396145
1981	12.30000	8.775500	11.80073	14.95300	7.529299
1982	9.330000	8.837827	11.82291	18.12700	8.076702
1983	12.05000	8.832740	11.86403	23.17900	8.209281
1984	10.36000	9.057305	11.93145	21.50500	8.168061
1985	4.800000	9.222664	11.95578	20.25700	8.560314
1986	5.730000	9.361429	12.01287	35.13500	8.764811
1987	8.900000	9.449751	12.06095	47.62300	9.083804
1988	5.470000	9.574428	12.11714	51.19000	9.391577
1989	5.970000	9.931054	12.18805	63.26600	9.178914
1990	9.530000	10.07824	12.25898	100.0000	9.036880
1991	9.520000	10.19208	12.32617	124.4760	9.185400
1992	4.940000	10.22140	12.38877	130.3860	9.351929
1993	9.770000	10.42641	12.45171	139.1260	9.345809
1994	9.240000	10.63253	12.77977	171.5350	9.288956
1995	8.640000	10.76077	12.86764	227.4640	9.380341
1996	6.470000	10.85228	12.97459	232.6930	9.462429
1997	11.61000	11.26885	12.97436	424.6930	9.894836
1998	77.63000	11.52482	12.83393	271.9130	9.030426

## Lampiran 4. Hasil Uji Akar-Akar Unit

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(C,3) INF

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           -1.3062
MacKinnon critical values:  1%      -3.7343
                             5%      -2.9907
                             10%     -2.6348
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(T,3) INF

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           0.7092
MacKinnon critical values:  1%      -4.3942
                             5%      -3.6118
                             10%     -3.2418
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(C,3) LJUB

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           -2.6871
MacKinnon critical values:  1%      -3.7343
                             5%      -2.9907
                             10%     -2.6348
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(T,3) LJUB

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           -2.2320
MacKinnon critical values:  1%      -4.3942
                             5%      -3.6118
                             10%     -3.2418
=====
```

**Lanjutan lampiran 4.**

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(C,3) LGDP

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           -0.4725
MacKinnon critical values:  1%      -3.7343
                             5%      -2.9907
                             10%     -2.6348
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(T,3) LGDP

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           -1.9211
MacKinnon critical values:  1%      -4.3942
                             5%      -3.6118
                             10%     -3.2418
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(C,3) IPINT

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           3.6601
MacKinnon critical values:  1%      -3.7343
                             5%      -2.9907
                             10%     -2.6348
=====
```

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(T,3) IPINT

```
=====
Dickey-Fuller t-statistic           2.7863
MacKinnon critical values:  1%      -4.3942
                             5%      -3.6118
                             10%     -3.2418
=====
```







## Lanjutan lampiran 5.

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(C,3) D2LGDDDB  
=====

Dickey-Fuller t-statistic		-4.3466
MacKinnon critical values:	1%	-3.7667
	5%	-3.0038
	10%	-2.6417

=====

Augmented Dickey-Fuller: UROOT(T,3) D2LGDDDB  
=====

Dickey-Fuller t-statistic		-4.0859
MacKinnon critical values:	1%	-4.4415
	5%	-3.6330
	10%	-3.2535

=====



Lampiran 6. Hasil Regresi Uji Kointegrasi

LS // Dependent Variable is INF  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:20  
 SMPL range: 1971 - 1998  
 Number of observations: 28

```

=====
VARIABLE      COEFFICIENT      STD. ERROR      T-STAT.      2-TAIL SIG.
=====
C              114.76040         48.762704        2.3534463     0.0275
LJUB          -3.0934261         2.9405582       -1.0519860     0.3037
LGDP          -5.5212496         5.3527587       -1.0314774     0.3130
IPINT         0.2627070         0.0589060        4.4597655     0.0002
LGDEB        -3.3411799         4.3826261       -0.7623694     0.4536
=====
R-squared          0.487067          Mean of dependent var      14.19429
Adjusted R-squared 0.397862          S.D. of dependent var      14.85551
S.E. of regression 11.52751          Sum of squared resid       3056.321
Log likelihood    -105.4290          F-statistic                  5.460049
Durbin-Watson stat 1.537240          Prob(F-statistic)          0.003057
=====
    
```

## Lanjutan lampiran 6.

Engle-Granger Cointegration Test: UROOT(C,3)

=====

--Cointegrating Vector--

INF	1.000000
LJUB	3.093426
LGDP	5.521250
IPINT	-0.262707
LGDDB	3.341180

Dickey-Fuller t-statistic		-1.8843
MacKinnon critical values:	1%	-5.9459
	5%	-5.0236
	10%	-4.5855

=====

Engle-Granger Cointegration Test: UROOT(N,3)

=====

--Cointegrating Vector--

INF	1.000000
LJUB	3.093426
LGDP	5.521250
IPINT	-0.262707
LGDDB	3.341180

Dickey-Fuller t-statistic		-1.8843
MacKinnon critical values:	1%	-5.9459
	5%	-5.0236
	10%	-4.5855

=====

Lampiran 7. Hasil Uji Partial Adjustment model (PAM) dan Koefisien Kovarian Matriks

LS // Dependent Variable is INF  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:09  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```

=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C              116.05857   41.233238   2.8146849  0.0104
LJUB           3.0670870   3.2470458   0.9445777   0.3556
LGDP          -6.9917211   5.0258634   -1.3911483   0.1787
IPINT          0.2500768   0.0500130   5.0002354   0.0001
LGDDB         -9.0939124   4.1643141   -2.1837720   0.0405
INF(-1)       0.8677904   0.3623349   2.3946652   0.0260
=====
R-squared      0.665805   Mean of dependent var  14.55741
Adjusted R-squared  0.586235   S.D. of dependent var  15.01133
S.E. of regression  9.655969   Sum of squared resid  1957.993
Log likelihood  -96.14316   F-statistic           8.367526
Durbin-Watson stat  2.254117   Prob(F-statistic)    0.000176
=====
    
```

```
=====
Coefficient Covariance Matrix
=====
```

```

C.C          1700.180   C.LJUB          -4.724326
C.LGDP      -186.4264   C.IPINT          0.843820
C.LGDDB     60.09889    C.INF(-1)       1.556182
LJUB,LJUB   10.54331    LJUB,LGDP       -1.997251
LJUB,IPINT  -0.065921    LJUB,LGDDB      -8.424781
LJUB,INF(-1) 0.744593    LGDP,LGDP       25.25930
LGDP,IPINT  -0.045493    LGDP,LGDDB      -10.55874
LGDP,INF(-1) -0.687196    IPINT,IPINT     0.002501
IPINT,LGDDB 0.015945    IPINT,INF(-1)  -0.002822
LGDDB,LGDDB 17.34151    LGDDB,INF(-1)  -0.157105
INF(-1),INF(-1) 0.131323
=====
```

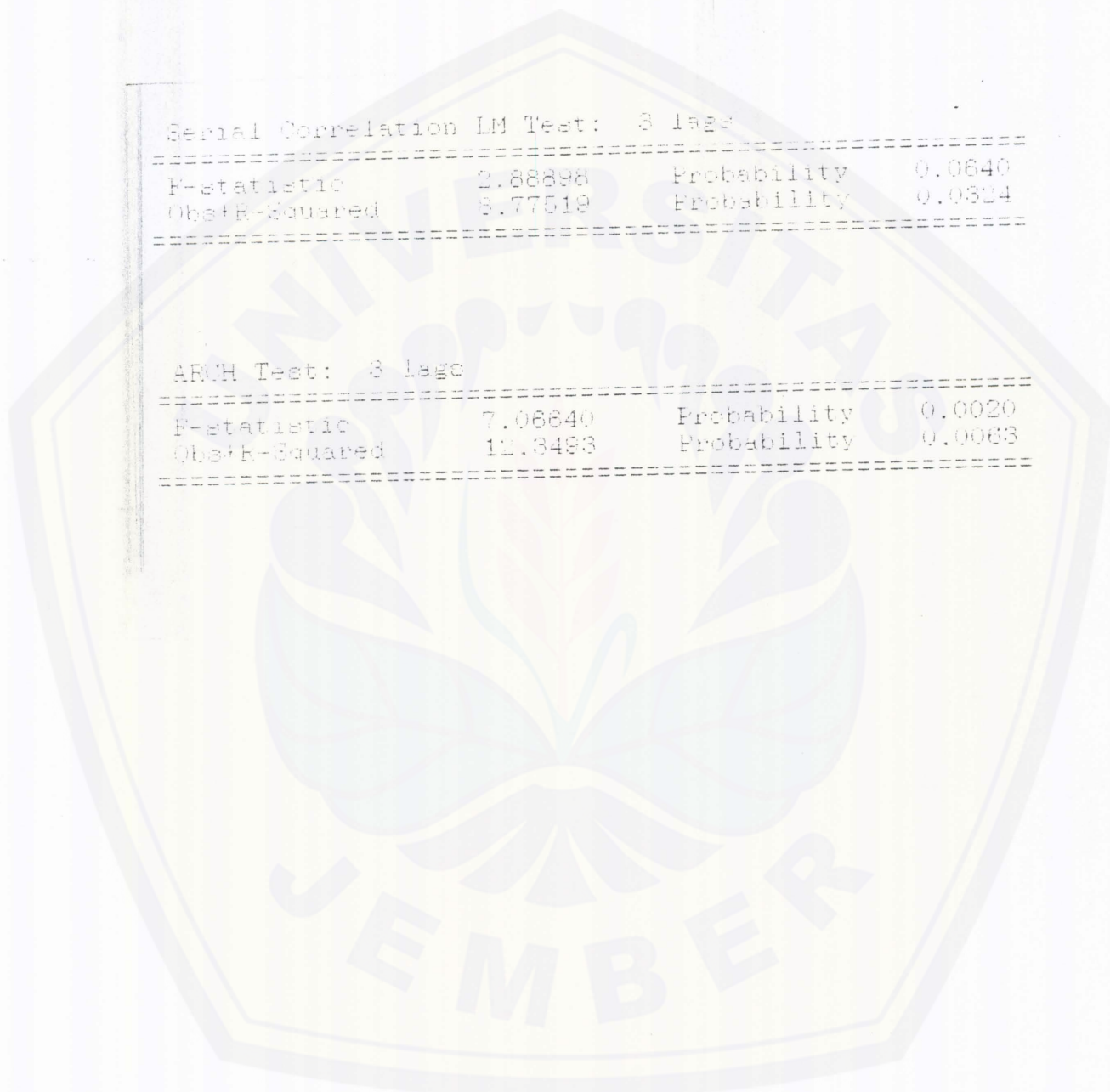
**Lanjutan lampiran 7**

Serial Correlation LM Test: 3 lags

F-statistic	2.88898	Probability	0.0640
Obs*R-Squared	8.77519	Probability	0.0324

ARCH Test: 3 lags

F-statistic	7.06640	Probability	0.0020
Obs*R-Squared	12.3493	Probability	0.0063



Lampiran 8. Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM) dan Koefisien Kovarian Matriks

LS // Dependent Variable is DINF  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:14  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```

=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C              197.37402    49.841107   3.9600648  0.0010
DLJUB         0.1381756    3.2725058   0.0422232  0.9668
DLGDP        -11.687411    3.1958185  -3.6570947  0.0020
DIPINT        4.951E-06    4.747E-06   1.0430764  0.3115
DLGDDB       -16.987577    8.0157354  -2.1192787  0.0491
LJUB(-1)     3.4384675    1.9868830   1.7305838  0.1016
LGDP(-1)    -19.483576    5.8067681  -3.3553231  0.0038
IPINT(-1)    0.0163423    0.0970117   0.1684572  0.8682
LGIDB(-1)    0.6067628    3.8360953   0.1581720  0.8762
ECT           0.0216143    0.0071857   3.0079549  0.0079
=====
R-squared      0.889511    Mean of dependent var  2.712592
Adjusted R-squared  0.831017    S.D. of dependent var  14.84331
S.E. of regression  6.101718    Sum of squared resid  632.9263
Log likelihood   -80.89732    F-statistic           15.20686
Durbin-Watson stat  2.361260    Prob(F-statistic)    0.000002
=====
    
```

## Coefficient Covariance Matrix

```

=====
C.C          2484.136   C,DLJUB          75.78414
C,DLGDP     -100.1203  C,DIPINT          7.22E-05
C,DLGDDDB   -0.234906  C,LJUB(-1)       9.709591
C,LGDP(-1)  -280.9903   C,IPINT(-1)     -0.265867
C,LGDDB(-1)  92.21138    C,ECT           0.122602
DLJUB,DLJUB 10.70929   DLJUB,DLGDP     0.352531
DLJUB,DIPINT -1.36E-06    DLJUB,DLGDDB    6.347055
DLJUB,LJUB(-1) 3.668991    DLJUB,LGDP(-1) -8.736331
DLJUB,IPINT(-1) 0.046396   DLJUB,LGDDB(-1) -1.235519
DLJUB,ECT     -0.000458   DLGDP,DLGDP    10.21326
DLGDP,DIPINT  -1.45E-06   DLGDP,DLGDDB   -4.848595
DLGDP,LJUB(-1) 1.150139   DLGDP,LGDP(-1) 12.58068
DLGDP,IPINT(-1) 0.059840   DLGDP,LGDDB(-1) -7.559150
DLGDP,ECT     -0.008588   DIPINT,DIPINT   2.25E-11
DIPINT,DLGDDB -2.40E-05   DIPINT,LJUB(-1) -1.34E-06
DIPINT,LGDP(-1) -5.65E-06   DIPINT,IPINT(-1) -1.63E-08
DIPINT,LGDDB(-1) 1.14E-06   DIPINT,ECT      5.45E-09
DLGDDB,DLGDDB 64.25201    DLGDDB,LJUB(-1) 0.861105
DLGDDB,LGDP(-1) -4.785155   DLGDDB,IPINT(-1) 0.112326
DLGDDB,LGDDB(-1) 4.000425   DLGDDB,ECT      0.001064
LJUB(-1),LJUB(-1) 3.947704    LJUB(-1),LGDP(-1) -0.895667
LJUB(-1),IPINT(+1) 0.014253    LJUB(-1),LGDDB(-1) -4.296477
LJUB(-1),ECT   -0.002304    LGDP(-1),LGDP(-1) 33.71853
LGDP(-1),IPINT(-1) 0.107125    LGDP(-1),LGDDB(-1) -13.88822
LGDP(-1),ECT   -0.018331    IPINT(-1),IPINT(-1) 0.009411
IPINT(-1),LGDDB(-1) -0.199206   IPINT(-1),ECT   -0.000591
LGDDB(-1),LGDDB(-1) 14.71563    LGDDB(-1),ECT   0.017265
ECT,ECT      5.16E-05
=====

```

**Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi, Heterokedastisitas  
dan Multikolinieritas dari Estimasi RCM**

Serial Correlation LM Test: 3 lags

F-statistic	1.58694	Probability	0.2370
Obs*R-Squared	6.85162	Probability	0.0768

ARCH Test: 3 lags

F-statistic	0.51865	Probability	0.6742
Obs*R-Squared	1.73238	Probability	0.6298



Lanjutan lampiran 9. Hasil Uji Mutikolinieritas dari Estimasi ECM

```

LS // Dependent Variable is LJUB(-1)
Date: 3-01-2000 / Time: 12:27
SMPL range: 1972 - 1998
Number of observations: 27
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C
  LGDP(-1)    -13.323739   3.8240598   -3.4841868  0.0018
              1.8490510   0.3216575    5.7485089  0.0000
=====
R-squared      0.569302    Mean of dependent var    8.610919
Adjusted R-squared 0.552074    S.D. of dependent var    1.960617
S.E. of regression 1.312187    Sum of squared resid     43.04586
Log likelihood   -44.60814    F-statistic               33.04535
Durbin-Watson stat 1.544356    Prob(F-statistic)        0.000005
=====

```

```

LS // Dependent Variable is LJUB(-1)
Date: 3-01-2000 / Time: 12:28
SMPL range: 1972 - 1998
Number of observations: 27
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C
  IPINT(-1)    6.6725620   0.3813507   17.497181  0.0000
              0.0299121   0.0046289    6.4619551  0.0000
=====
R-squared      0.625507    Mean of dependent var    8.610919
Adjusted R-squared 0.610527    S.D. of dependent var    1.960617
S.E. of regression 1.223578    Sum of squared resid     37.42855
Log likelihood   -42.72040    F-statistic               41.75686
Durbin-Watson stat 0.516015    Prob(F-statistic)        0.000001
=====

```

## Lanjutan lampiran 9.

LS // Dependent Variable is LJUB(-1)  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:28  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C
  LGDDB(-1)   -1.1120949   0.8686814  -1.2802104  0.2122
              1.2196027   0.1072177   11.375008   0.0000
=====
R-squared          0.838073   Mean of dependent var    8.610919
Adjusted R-squared 0.831596   S.D. of dependent var   1.960617
S.E. of regression 0.804579   Sum of squared resid    16.18369
Log likelihood     -31.40159   F-statistic              129.3908
Durbin-Watson stat 0.879054   Prob(F-statistic)       0.000000
=====
```

LS // Dependent Variable is LGDP(-1)  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:30  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C
  IPINT(-1)   11.131165   0.1734045   64.191888   0.0000
              0.0112881   0.0021048   5.3629500   0.0000
=====
R-squared          0.534981   Mean of dependent var    11.86266
Adjusted R-squared 0.516380   S.D. of dependent var   0.800047
S.E. of regression 0.556375   Sum of squared resid    7.738822
Log likelihood     -21.44191   F-statistic              28.76123
Durbin-Watson stat 1.582179   Prob(F-statistic)       0.000015
=====
```

Lanjutan lampiran 9.

LS // Dependent Variable is LGDP(-1)  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:30  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C              8.2110664    0.4744553   17.306300  0.0000
LGDD(-1)      0.4580359    0.0585601    7.8216431  0.0000
=====
R-squared      0.709903     Mean of dependent var  11.86266
Adjusted R-squared  0.698299     S.D. of dependent var  0.800047
S.E. of regression  0.439444     Sum of squared resid   4.827776
Log likelihood  -15.07175    F-statistic           61.17810
Durbin-Watson stat  2.079547     Prob(F-statistic)     0.000000
=====
```

LS // Dependent Variable is IPINT(-1)  
 Date: 3-01-2000 / Time: 12:30  
 SMPL range: 1972 - 1998  
 Number of observations: 27

```
=====
VARIABLE      COEFFICIENT  STD. ERROR  T-STAT.  2-TAIL SIG.
=====
C             -161.30962    33.849167   -4.7655418  0.0001
LGDD(-1)     28.362210    4.1778624    6.7886892  0.0000
=====
R-squared      0.648315     Mean of dependent var  64.80185
Adjusted R-squared  0.634247     S.D. of dependent var  51.83970
S.E. of regression  31.35135     Sum of squared resid   24572.67
Log likelihood  -130.2943    F-statistic           46.08630
Durbin-Watson stat  0.443054     Prob(F-statistic)     0.000000
=====
```